

Sejarah Ekumene GMIM Tahun 1934-1980

Riedel Ch Gosal

Fakultas Teologi, Universitas Kristen Indonesia Tomohon

Penulis Korespondensi; ridel_gosal@teologi-ukit.ac.id

Diterima: 24 Juni 2020; Disetujui : 10 Juli 2020

ABSTRACT

Ecumenical movement is the old issue in the history of Church journey. In Indonesia the movement grow in the local churches that initiate to make the The Council of Churches in Indonesia or Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI). The name then change to The Communion of Churches in Indonesia or Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI). However PGI had exist but the unity condition and the life together among churches in Indonesia is not achieved yet till now. This things is related to the role of the local churches as the part of PGI. In this context, I will elaborate the role of GMIM in the ecumenical movement in Indonesia in the period of 1934-1980. GMIM is one of the founding member of DGI and has been member since the declaration.

This paper written with historical descriptive approach with analyzing historical data that had been gathered. Data source acquired in the literature study such as books, archive, and interview. The goal of this research not only to highlighting the role of GMIM in the ecumenical movement but also to describe the history of the ecumenical movement and the positive contribution for the churches in their participating in the ecumenical movement in Indonesia.

The result of this study shown that GMIM as one of the member of PGI has giving a huge contribution in the ecumenical movement in Indonesia in 1934-1980, the role is affected by the relation with the ecumenical figure from outside Minahasa and zendeling in Minahasa. This role is supported by GMIM ecumenicaly agendas that ha growth before declaration of DGI. History experience of GMIM at the zendelin period and the experience of war in Japan colonial era and Permesta. This process has made the character building of ecumenical figure and congregation of GMIM.

Keywords : *Ecumenical movement, GMIM*

ABSTRAK

Gerakan ekumenis adalah isu yang telah lama dalam perjalanan sejarah gereja. Di Indonesia gerakan ini tumbuh dari gereja-gereja lokal, yang telah berinisiatif membentuk Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Nama DGI kemudian berubah menjadi Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Meskipun PGI telah ada tetapi kondisi kehidupan beres dan bersama diantara gereja-gereja di Indonesia belum bisa tercapai hingga kini. Hal ini tentu terkait erat dengan peranan gereja-gereja lokal sebagai anggota PGI. Pada konteks ini penulis membahas Peranan GMIM dalam gerakan ekumenis di Indonesia tahun 1934-1980. GMIM adalah salah satu gereja perintis pembentukan DGI dan telah menjadi anggotanya sejak di deklarasikan.

Karya ilmiah ini ditulis dengan menggunakan pendekatan historis deskriptif dengan menganalisa data-data sejarah yang telah dikumpulkan. Sumber data diperoleh dalam studi kepustakaan berupa buku-buku literature, studi arsip, dan wawancara. Tujuan karya ilmiah ini tidak sekedar mengangkat peranan GMIM dalam gerakan ekumene tetapi juga mendeskripsikan sejarah gerakan ekumenis serta sumbangsih postif bagi gereja-gereja dalam keterlibatannya pada gerakan ekumene di Indonesia.

Hasil studi menunjukkan bahwa GMIM sebagai salah satu gereja anggota PGI telah memberi kontribusi besar dalam gerakan ekumenis di Indonesia pada periode 1934-1980, peranan itu dipengaruhi oleh hubungan dengan tokoh ekumenis dari luar Minahasa dan zendeling di Minahasa. Peranan ini di dukung oleh program-program GMIM yang bersifat ekumenis telah berkembang sebelum dekalarasi DGI berdiri. Pengalaman sejarah GMIM pada masa zending dan pengalaman melewati masa pergolakan perang kemerdekaan, masa pendudukan Jepang, dan perang Permesta. Proses ini telah membentuk karakter ekumenis tokoh-tokoh dan jemaat GMIM.

Kata Kunci : Gerakan ekumenis, GMIM

PENDAHULUAN

Keesaan adalah salah satu aspek penting yang menjadi identitas gereja. Alkitab menegaskan tentang keesaan dalam doa Yesus bagi umatNya dalam Yohanes 17:21 supaya mereka menjadi satu (*Ut Omnes Unum Sint*). Dalam pengakuan iman rasuli aspek keesaan juga disebutkan sebagai salah satu karakter gereja, yaitu kudus, *am* dan rasuli.

Sejak zaman dulu hingga sekarang gereja terus berusaha ke arah keesaan. Usaha itu dilakukan dalam aras internasional dan nasional. Realitas keesaan itu juga belum dapat dicapai hingga kini. Perjalanan sejarah gereja-gereja di Indonesia juga menunjukkan bahwa usaha keesaan sudah dan sementara di perjuangkan oleh individu dan kelompok yang terlibat dalam organisasi atau lembaga keesaan.

Gagasan gerakan keesaan di Indonesia lahir berlatar belakang kesadaran dari gereja-gereja lokal yang ingin membentuk satu wadah yang esa di Indonesia. Semangat gerakan keesaan terus tumbuh bersamaan dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai wujud dari kerinduan untuk berjalan bersama, usaha ini mengerucut menjadi suatu gerakan yang dikenal dengan nama gerakan keesaan atau gerakan oikumene.¹ Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) adalah perwujudan dari semangat keesaan dari gereja-gereja di Indonesia. Persekutuan gereja di Indonesia lahir dengan nama Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI).²

Lahirnya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia membuktikan keinginan gereja-gereja di Indonesia ingin berjalan bersama-sama untuk mewujudkan keesaan sekalipun secara historis lahirnya gereja-gereja lokal di Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda. Gereja-gereja lokal dan orang-orang Kristen yang menyadari bahwa di Indonesia perlu wadah yang mempersatukan gereja yang berbeda-beda. Ide keesaan ini di realisasikan dalam sebuah proses panjang. Proses itu berujung pada lahirnya komitmen bersama berupa manifest pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia pada tanggal 25 Mei 1950.

Kendati telah bersama-sama berikrar dalam satu komitmen untuk menuju pada Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia tetapi realitas idealis ini hingga kini belum bisa dicapai. Perbedaan-perbedaan di antara gereja-gereja tidak mudah untuk dilebur dalam satu wadah keesaan. Latar belakang gereja yang lahir dalam konteks suku dan warisan lembaga zending yang berbeda ini membuat gereja-gereja tumbuh mandiri dan terpisah, baik ajaran yang berkembang, teritorial dan sistem

¹ Istilah oikumene di Indonesiakan menjadi ekumene. Oikumene (Yunani: **οικουμένη**) secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* dan *mene*. *Oikos* berarti rumah, ruang, tempat, dunia dan *mene* dari kata *menein* berarti didiami. Secara harafiah oikumene berarti rumah yang didiami. Dalam Alkitab ekumene memiliki beberapa arti, *pertama* dalam Lukas 4:5 dan Roma 10:18; oikumene diartikan sebagai dunia yang didiami. *Kedua*, kitab Lukas 2:1 Oikumene diartikan seluruh dunia atau daerah yang dikuasai atau di jajah bangsa Romawi. Chris Hartono. 1984. Gerakan Ekumenis di Indonesia (Yogyakarta, Pusat Penelitian Dan Inovasi “Duta Wacana”) hlm.1

² Dewan Gereja-Gereja di Indonesia diubah menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia pada persidangan di Ambon yang ke X di Ambon pada tanggal 21-31 Oktober 1984.

pemerintahan gereja yang dianutnya. Sejarah masuknya injil di dalam masyarakat Indonesia telah melahirkan gereja-gereja lokal yang telah berakar kuat dan mapan.

Keadaan ini menghadang Dewan Gereja-gereja di Indonesia sebagai wadah keesaan untuk mencapai cita-cita pembentukan Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia. Keadaan ini terus menerus menjadi bahan pergumulan dan diskusi dalam setiap persidangan DGI hingga pertengahan tahun 80-an belum menunjukkan hasil yang maksimal bagi pembentukan satu Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia. Masalah mengenai bentuk keesaan dalam wadah Gereja Kristen Yang Esa belum mencapai kata sepakat. Bagaimanakah model keesaan yang akan diwujudkan di tengah-tengah gereja yang berbeda-beda latar belakang ini? Masalah ini sampai pada diskusi tentang model atau bentuk keesaan yang cocok bagi gereja-gereja di Indonesia. Apakah cukup pada keesaan Rohani saja atau keesaan struktural dan fungsional.

Gagasan tentang model atau bentuk keesaan di Indonesia mulai di rancang pada 19-13 Juli 1980 sebuah persidangan DGI di Tomohon. Para peserta mengambil langkah berani dengan mempersiapkan rancangan konsep keesaan yang akan dibahas pada persidangan selanjutnya. Pada sidang ini Dewan Gereja-Gereja di Indonesia sepakat untuk menekankan keesaan pada satu pengakuan percaya dan tata gereja. Kesepakatan ini tidak mudah direalisasikan dalam prakteknya karena masing-masing gereja telah memiliki pengakuan iman dan tata gereja yang telah mapan. Gagasan baru lahir dengan mengubah nama Dewan Gereja-gereja di Indonesia menjadi Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia pada persidangan ke sepuluh di Ambon turut juga mengubah muatan keesaan itu. Pemahaman dan misi keesaan DGI dari usaha *membentuk* menjadi *mewujudkan* Gereja Krsiten yang esa. Langkah ini menjadi perdebatan beberapa tokoh ekumenis yang mengaggap bahwa ini adalah tindakan mundur dari misi dan visi yang telah ditetapkan oleh penggaggas atau pendiri dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI).

Usaha dan perjuangan PGI sebagai wadah keesaan untuk mewujudkan Gereja Kristen Yang esa di Indonesia sejak tahun 50-an hingga kini belum dan masih sementara. Kondisi ini diungkapkan A.A.Yewangoe (ketua PGI periode 2010-2015) dalam perayaan Ulang tahun PGI ke-60 pada bulan Mei tahun 2010, bahwa salah satu pergumulan yang dihadapi Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia adalah bagaimana mewujudkan Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia.³

Di tengah maju mundurnya gerakan keesaan di Indonesia, tak dapat dipungkiri bahwa telah ada langkah maju dalam proses keesaan. Kehadiran PGI sebagai wadah keesaan telah memberi andil pada terjalannya interaksi antar gereja-gereja lokal di Indonesia. Peranan PGI sebagai wadah keesaan tidak bisa dilepaskan dari peranan gereja-gereja lokal, dewan wilayah dan tokoh-tokoh ekumenis di Indonesia. Peranan itu telah dibuktikan pada pembentukan DGI. Peranan gereja-gereja lokal dalam gerakan ekumene di Indonesia telah memberi arah pada keesaan. Beberapa gereja mandiri pada periode masa awal lahirnya gerakan keesaan telah memberi kontribusi penting dalam usaha merintis gerakan keesaan di Indonesia. Salah satu gereja yang turut berperan dalam gerakan keesaan di Indonesia adalah Gereja Masehi Injili di Minahasa.

Dalam kerangka berpikir di atas maka penulis memiliki kerinduan hendak mengkaji bagaimana peranan Gereja Masehi Injili di Minahasa dalam gerakan keesaan di Indonesia dalam suatu karya ilmiah yang berjudul "Minaesa Beresa" dengan sub judul " Suatu Studi tentang peranan GMIM dalam gerakan keesaan di Indonesia tahun 1934-1980"

Judul ini di tetapkan penulis melalui perenungan panjang, sebagai salah satu Tenaga Utusan Gereja (TUG) GMIM yang melayani di Gereja Kristen Sulawesi Selatan. Penulis juga mendapati kenyataan bahwa beberapa gereja yang berdiri di Sulawesi Selatan, salah satu perintis jemaat berdiri berasal

³A.A. Yewangoe. 2010. Keberadaan PGI tidak bisa dilepaskan dari gereja-gereja. Oikumene,(edisi khusus 60 tahun PGI): 15-17.

dari anggota jemaat gereja Masehi Injili di Minahasa yang telah tinggal menetap lama bahkan ada yang menetap sampai akhir hayatnya mengabdikan pada gereja yang di Sulawesi Selatan. Realitas ini mendorong penulis untuk mengkaji bagaimana GMIM hadir dalam proses perwujudan keesaan gereja-gereja di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul tulisan ini yaitu peranan GMIM dalam gerakan ekumene di Indonesia pada tahun 1934-1980. Sumber-sumber penelitian diperoleh penulis melalui penelitian literatur di perpustakaan STT INTIM Makasar, Perpustakaan UKIT Tomohon, Perpustakaan A. Z. R. Wenas di Tomohon, dan Kantor sinode GMIM khususnya arsip-arsip yang berada di ruangan arsip sinode GMIM dan data dari Kantor Sinode AM SULUTENG di Manado.

Jenis Penelitian

Dalam menyusun tulisan ini penulis menggunakan metode Historis deskriptif. Peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa sejarah secara sistematis dan objektif dengan cara menggali, mempelajari, dan menyusun fakta-fakta sejarah yang terkait dengan pokok dalam tulisan ini. Penelitian ini mendeskripsikan secara historis peranan GMIM dalam gerakan ekumene di Indonesia pada tahun 1934-1975

Metode Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data sesuai dengan tulisan ini maka penulis menemukan data primer dan sekunder. Penulis memperoleh data ini dari sumber yang telah di publikasikan secara resmi dan belum dipublikasikan. Data itu diperoleh dalam,

1. Studi kepustakaan melalui buku-buku literatur penulis berusaha mempelajari, menganalisa data dan mengutip teori atau konsep dari sejumlah literatur yang terkait dengan pokok yang dibahas dalam tulisan ini.
2. Studi arsip yang didapat penulis melalui arsip, dokumen, notulen hasil rapat dan sidang di kantor sinode GMIM, internet dan arsip yang didapat dari perorangan.

Selain itu penulis juga menggunakan data yang diperoleh melalui pengalaman, wawancara dari beberapa tokoh yang mempunyai ingatan yang sempat terekam sebagai warga GMIM yang turut menjadi pelaku sejarah.

Metode Analisa Data

Data yang digunakan adalah data sejarah berarti data yang terjadi pada masa lampau karena itu penulis menyusun data secara sistematis dan diklasifikasi menurut pokok yang berhubungan dengan judul. Setelah data terkumpul dan dikelompokkan penulis menggunakan kritik sumber dan menginterpretasi data sejarah yang dikumpulkan. Metode ini dibuat penulis untuk mengungkap, menjelaskan dan mengetahui serta menganalisa data tentang peranan GMIM dalam gerakan ekumene di Indonesia pada tahun 1934-1980.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PROGRAM DAN PERANAN GMIM

Program GMIM Dalam Kaitan Dengan Gerakan Ekumene

Gereja Masehi Injili di Minahasa dalam tata ibadahnya menggunakan pengakuan iman ekumenis yaitu pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Nicea. Dalam notulen sidang ke-58, ditegaskan bahwa dalam gerakan ekumene berazaskan pada gereja yang kudus dan am dan rasuli. Pernyataan ini menjelaskan posisi GMIM sebagai bagian dari gereja yang esa di dunia. Atas dasar itu, GMIM turut berpartisipasi aktif dalam gerakan keesaan di Indonesia dan Internasional.⁴ Perannya secara nasional melalui wadah GPI dan DGI, secara internasional CCA dan WCC dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Untuk melaksanakan misi gereja dalam kaitan dengan gerakan keesaan, GMIM selalu berusaha menjajaki dan menggumuli keterlibatannya secara terus menerus.

Panggilan gereja diarahkan pada, dari, dan untuk Kristus. Misi ini tentu berbeda-beda dan terus diperbaharui menurut menurut kondisi, ruang, gerak dan waktu atau konteks yang berlainan dengan bentuk tugas yang beraneka ragam namun pelayanan dan panggilan tetap sama ialah.

*Memberitakan injil Yesus dan firman Allah dengan kesaksian dan pelayanan manusia dengan kesaksian di dalam masyarakat. Sementara itu memperhatikan, mengusahakan pembangunan diri pribadi, keluarga, sesama kita dalam segala relasi dan toleransi secara perorangan maupun bersama-sama, untuk mengungkapkan hidup persekutuan sejahtera dan kedamaian di tengah sesama dan masyarakat sekitar.*⁵

GMIM memperjelas pemahaman ekumenisnya bahwa pembangunan dan misi dalam hubungan dengan keesaan gereja harus dibangun secara utuh. Wawasan ekumenis ditanamkan dan dibangun secara internal dan eksternal. Implementasi dari program ekumenis GMIM dalam ketetapan Sidang Sinode maupun kebijakan dari badan pekerja sinode sebagai pelaksana tugas dalam organisasi GMIM.

Dalam tulisan ini penulis mempelajari dan mendeskripsikan program-program ekumenis GMIM pada tahun 1934-1980.

Masa kepemimpinan pendeta Belanda (1934-1942)

Setelah GMIM berdiri sendiri, awal kepengurusannya dipimpin oleh pendeta dari Belanda. Kondisi ini terjadi karena GMIM masih berada pada perwalian GPI karena itu struktur organisasi ditetapkan oleh GPI. Penetapan ketua sinode dan pimpinan ditingkat klasis dan jemaat diatur oleh GPI. Sebagai bagian dari GPI, GMIM melaksanakan aturan dalam lingkup GPI. Dalam rapat GPI tahun 1933, rumusan pengakuannya disebutkan bahwa *alas Geredja Masehi Injili jaitoe Jesoes Kristoes*. Pada masa kepemimpinan para pendeta Belanda, pengurus sinode GMIM banyak memberi perhatian pada perbaikan organisasi secara internal. Termasuk program dalam bidang keesaan. Pada periode pertama tahun 1934-1935, GMIM dipimpin oleh Ds. E.A.A. Vreerde. Pengurus menghadapi masalah internal yang pertama di hadapi adalah pemberian hak mengatur pada orang-orang Minahasa. Para pendeta Minahasa merasa kurang diberi tempat dalam kepemimpinan dan pelayanan dalam jemaat, klasis, dan sinode. Karena anggapan itu maka mereka selalu mengkritik *Kerksbestuur* yang terlalu mendominasi urusan organisasi dalam GMIM. Usaha pengurus sinode mengatasi masalah ini adalah program pengkaderan para pemimpin dan pendeta Minahasa. Dalam program itu, pengurus mengutus beberapa orang untuk belajar di *Hoongere Theologishe School*

⁴ Sumber Arsip: GMIM, Notulen Sidang Sinode GMIM ke 56 tanggal 24-28 1979., hlm. 117-118.

⁵ Ibid.

(HTS) Bogor. Pengutusan itu disertai dengan pembiayaan rutin dengan mengirimkan dana sebesar f. 3000 sebagai bantuan pendidikan bagi utusan di sana.⁶

Pada masa ini kesenjangan pendidikan dalam jemaat dan masyarakat juga turut mempengaruhi gereja. Mereka yang telah mengenyam pendidikan mengelompokkan diri pada kaum intelek. Sikap kaum intelek menjadi keprihatinan anggota sinode khususnya dalam kalangan pendeta Minahasa. Seseorang yang mampu berbahasa Belanda dianggap termasuk dalam kelompok kaum intelektual. Bahasa Belanda adalah salah satu materi yang diajarkan di sekolah. Kaum terpelajar itu, cenderung menjauhkan diri dari kehidupan gereja. Cara ini menciptakan jurang pemisah dengan orang-orang yang tidak terpelajar. Kondisi ini terjadi tidak hanya dalam lingkungan masyarakat tetapi juga jemaat.⁷ Mereka yang tetap mengikuti kegiatan jemaat juga bermasalah karena dalam khotbah atau renungan mereka menggunakan bahasa Belanda dan kurang menggunakan bahasa Melayu. Cara ini menyebabkan jemaat kurang memahami isi khotbahnya karena jemaat belum banyak memahami dan mengerti bahasa Belanda. Kondisi ini menjadi keprihatinan sinode sehingga para pengurus berusaha mencari solusi dalam rapat sinode. Dalam keputusannya sinode menetapkan bahwa perlu memberi perhatian khusus kepada kaum terpelajar ini tetapi hal itu tidak boleh mengabaikan pemeliharaan keesaan jemaat.⁸ Sinode mendorong jemaat untuk sekolah dan menggiatkan bidang pendidikan serta pembinaan warga gereja. Kepemimpinan Ds. E.A.A. Vreerde berakhir pada tahun 1935. Ia digantikan oleh Ds. C.D. Buenk.

Masa kepemimpinan Ds. C.D. Buenk pada periode kedua tahun 1935-1937. Perbedaan kebangsaan dan bahasa menjadi isu yang kuat pada kepemimpinannya sementara itu kebutuhan agar GMIM dipimpin oleh orang Minahasa semakin kuat. Ada suara-suara yang menghendaki agar kepemimpinan para pendeta Belanda dikurangi. Hal ini terjadi bukan karena mereka tidak menghendaki kepemimpinan orang Belanda tetapi ingin agar GMIM benar-benar berdiri sendiri. Keadaan ini masih terbendung karena beberapa peserta sidang menganggap bahwa masih kurang para pendeta Minahasa yang berpendidikan tinggi. Hal ini diakui oleh Ds. B. Mundung seorang tokoh pendeta Minahasa yang pernah mengikuti kegiatan internasional sehingga memiliki wawasan ekumenis yang luas. Ia berpendapat bahwa sekalipun ada yang telah menunjukkan kemampuannya memimpin jemaat dan klasis tetapi para pendeta Minahasa perlu memiliki pendidikan yang tinggi. Ia juga mengatakan bahwa kehadiran para pendeta Belanda perlu dilihat dalam kerangka keesaan kristiani sebab Kristus adalah kepala gereja dan denganNya pandangan tentang perbedaan kebangsaan jatuh. Disamping itu perbedaan pendidikan antara pendeta Belanda dengan pendeta Minahasa masih jauh.⁹ Umumnya para pendeta GMIM adalah hasil didikan pendeta Belanda, sementara itu sekolah yang mendidik khusus para pendeta Minahasa masih terbatas. Keterbukaan para anggota sinode dan para pendeta Minahasa tidak mematahkan semangat para pendeta Belanda untuk tetap mencintai pelayanannya dan menjadi bagian dari orang-orang Minahasa. Diantara para pendeta Belanda ada yang berkata biarlah pendeta Belanda bekerja dan dipandang selaku anak bumiputra untuk keselamatan Minahasa.¹⁰ Pada periode Ds. C.D. Buenk beberapa utusan orang

⁶ Sumber Arsip: GMIM, Notulen Sidang Sinode GMIM tanggal 4-9 januari 1935., hlm. 19, 23

⁷ Sumber Arsip: GMIM, Notulen Sidang Sinode GMIM 1935.hlm. 19, 35-37. De Vreede sendiri kemudian pindah ke Batavia untuk memegang jabatan sekretaris kerkbektuur. Ditahun 1936, Ds Buenk masih menyampaikan ucapan terimakasih kepada mereka yang tidak lagi menjadi anggota sinode dan berharap bahwa sinode tidak lagi membiarkan gereja dalam keadaan sulit oleh karena perbedaan berpikir diantara beberapa orang (notulen persidangan sinode 1936, tanggal 23-26 November.Hlm. 5

⁸ Ibid.

⁹ Sumber Arsip: GMIM, Notulen Sidang Sinode GMIM 23-26 November 1936. hlm 17. Dijelaskan bahwa kelihatan adanya keraguan pada sebagian pendeta Minahasa, apakah dengan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi berarti orang tidak dapat menghayati lagi keuniversalan gereja.

¹⁰A.F. Parengkuan. 2004. *Op. Cit.*, Hlm. 95

Minahasa ikut dalam konferensi PI Sedunia di Tambaram (Mandras) pada tahun 1938. Dalam daftar utusan yang dicatat bahwa pertama kali utusan lebih banyak orang Indonesia. Zendingconsulat mengutus mereka mewakili kelompok-kelompok Kristen di Indonesia tercatat dalam daftar tiga orang Minahasa yaitu Ds. B. Mundung dan ibu dari Motoling Minahasa serta R.M.Luntungan mewakili mahasiswa STT.¹¹

Ds. H. H. van Herweden menggantikan Ds. C.D. Buenk, Ia memimpin GMIM tahun 1937-1941. Dalam usahanya membuat perbaikan organisasi secara internal, ia memberi perhatian pada keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam organisasi gereja. Program memberi keseimbangan atau pemerataan peran bagi para perempuan dan pemuda dalam jemaat adalah wujud dari sikap ekumenis. Program ini menyatukan perbedaan yang mengakibatkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat berjalan bersama dalam pelayanan gereja. Alasan peranan perempuan dalam gereja karena menurut pengamatan kehadiran perempuan dalam setiap ibadah lebih besar dari pada para laki-laki. Diperkirakan 75 persen dari jumlah yang hadir. Kehadiran perempuan yang lebih banyak dalam kegiatan ibadah melahirkan ide agar untuk mengikut sertakan perempuan dalam pelayanan sebagai anggota majelis. Ada pendapat yang menentang ide ini. Pendapat itu didasarkan pada pandangan Paulus tentang perempuan tidak diberi tempat dalam pelayanan gereja tetapi anggota sidang menjelaskan bahwa pandangan itu ada dalam satu masa dan latar belakang yang berbeda sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan Minahasa tidak boleh terlibat dalam pelayanan gereja. Dalam kaitan dengan tata gereja tidak ada pasal yang melarang perempuan terlibat dalam kegiatan gereja. *Kerksbestuur* juga memberi ijin bagi perempuan untuk turut terlibat dalam pelayanan dengan memegang jabatan Penatua.¹²

Dalam bidang kepemudaan di lingkungan GMIM terdapat dua organisasi pemuda yang telah berdiri yaitu Serikat Pemuda Masehi (SPM) dan Bond van Holandsch Sprekende Jongeren in de Minahassa atau Minahassische Christelijke Jongeren Bond (MCJB) ini adalah persekutuan pemuda Minahasa yang berbahasa Belanda. Lahirnya organisasi kepemudaan dalam GMIM banyak dipengaruhi oleh semangat kebangsaan yang sementara tumbuh dan berkembang di Indonesia. Pada masa kepemimpinan Ds. H.H. van Herweden keduanya dilebur termasuk organisasi kepemudaan dalam lingkungan GMIM pada tanggal 29 Desember 1939. Organisasi kepemudaan itu diberi nama Persatuan Serikat Pemuda Masehi Minahasa (PSPMM). Penyatuan organisasi pemuda ini menunjukkan bahwa organisasi pemuda tidak bekerja dengan membawa panji masing-masing organisasi pemuda tetapi berada dalam satu organisasi. Ini merupakan perwujudan gerakan ekuemenis dalam kalangan pemuda GMIM. Organisasi ini menjadi bagian dalam organisasi dan struktur GMIM. Sesuai dengan keadaan klasis Minahasa pada masa itu yang terdiri dari sepuluh klasis maka organisasi ini juga terbagi dalam sepuluh cabang. Organisasi ini juga turut berpengaruh dalam gerakan keesaan GMIM ketika terlibat dalam gerakan keesaan pemuda gereja di tingkat nasional pada masa kepemimpinan Ds. A .Z. R. Wenas.

Gereja Minahasa adalah hasil yang penginjilan dan bentukan beberapa zendeling dan lembaga zending yang berbeda, sekalipun telah disatukan dalam dalam sinode GMIM tetapi masih memiliki perbedaan dalam kegiatannya di jemaat-jemaat, diantaranya perbedaan pelaksanaan liturgi (tatacara). Khususnya liturgi persiapan perjamuan kudus dan pemakaman. Tatacara pemakaman di kampung yang satu diatur oleh pemerintah sedangkan di kampung yang lain diatur oleh majelis gereja bahkan ada pula yang diatur oleh keluarga orang yang meninggal. Perbedaan-perbedaan ini kemudian disatukan oleh sinode dengan menerbitkan liturgi seragam untuk seluruh jemaat GMIM. Pelaksanaannya diatur oleh majelis gereja. GMIM juga membuat tatacara khusus untuk kebaktian

¹¹ P. N. Holtrop. 1982. *Selaku Perintis Jalan*. (Yogyakarta: Kanisius). hlm 10.

¹² *ibid*

pengucapan syukur untuk mengarahkan jemaat-jemaat dalam suasana sukacita. Pada masa itu pengucapan syukur sering disertai dengan pesta pora dan perkelahian.¹³

Dalam hubungan dengan warga gereja Minahasa yang merantau ke daerah lain. GMIM menghadapi persoalan serius. Warga gereja Minahasa membawa budayanya dalam kehidupan di perantauan. Salah satu ciri khas warga Kawanua atau orang Manado adalah suka berkumpul. Ikatan itu mendorong kawanua membentuk perkumpulan-perkumpulan sosial bahkan persekutuan untuk beribadah di tempat mereka studi, bekerja dan tinggal. Persekutuan dan perkumpulan yang mapan berujung pada kerinduan untuk menjadi suatu jemaat yang berlatar belakang warga kawanua. Pada konteks ini ada tuntutan terhadap pengurus sinode GMIM untuk mengakui dan menetapkan gereja-gereja yang berada di luar Minahasa sebagai bagian dari GMIM. Pengurus sinode mengambil sikap dan menetapkan bahwa tidak GMIM lain di luar tanah Minahasa. Hanya diharapkan orang Minahasa di luar tanah Minahasa tetap mencintai tanah asalnya. Dalam tata gereja 1939, telah ditegaskan bahwa GMIM dirupakan oleh segala jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa. Jemaat masehi lain di luar tanah Minahasa terhubung dengan GMIM oleh sinode Am Gereja Protestan di Indonesia sesuai dengan pasal 1 ayat 1. Hal ini didasarkan pada pengertian bahwa GMIM hanyalah salah satu bagian dari GPI sebagai gereja induk.¹⁴ Ketetapan ini masih dilanjutkan dalam tata gereja tahun 1999. Yang menegaskan bahwa GMIM adalah gereja mandiri yang berada dalam dalam lingkup GPI.¹⁵ Sikap ini menunjukkan penerimaan dan pengakuan GMIM atas gereja anggota GPI lain. cara pandang ini juga berlaku sampai masa kini dalam kaitannya dengan keanggotaan GMIM dalam PGI. Warga GMIM yang tinggal di luar tanah Minahasa yang tinggal dalam dalam wilayah teritorial jemaat anggota PGI disarankan menjadi warga gereja setempat. Ketetapan menunjukkan cara pandang sinode GMIM yang berwawasaan ekumenis. Sikap ini juga didukung oleh budaya orang Minahasa yang terbuka dan mau berbaur dengan kultur lain.

Masa kepemimpinan G.P.H.Locher di GMIM tidak berlangsung lama karena invasi Jepang di Indonesia terjadi pada tahun berikutnya dalam kepemimpinannya. Tetapi masa ini menjadi masa penting karena sebelum Jepang masuk ke Minahasa ia merealisasikan apa yang telah menjadi konsep, masa kepemimpinan Herweden bahwa kepemimpinan harus diserahkan kepada para pendeta Minahasa. Ketua sinode diserahkan kepada Ds. A.Z.R.Wenas (1942-1945) sebagai ketua II terpilih masa itu. Penyerahan kepengurusan sebelum invasi Jepang berarti pengurus GMIM telah dipersiapkan menghadapi keadaan gereja pada masa itu.

Masa Pendudukan Jepang Hingga Tahun 1950

Sejak 11 Januari 1942, GMIM harus berdiri sendiri dalam arti penuh sebab hubungan Indische Kerk dengan GMIM terputus. Jepang menawan para pendeta dan pengurus gereja yang berkebangsaan Belanda. Untuk menghindari kecurigaan Jepang terhadap gereja maka beberapa pokok dalam tata gereja yang berkaitan dengan Indische kerk atau GPI dihapus karena GPI identik dengan pemerintah Belanda. Kepengurusan gereja dari sinode hingga jemaat diganti dengan pendeta asal Minahasa. Pada masa pendudukan Jepang gereja-gereja Minahasa dikumpulkan dalam wadah yang dibentuk oleh pemerintah *Menado Syuu Kirisutokyo Kyookai* (MSKK). Beberapa pendeta GMIM turut terlibat dalam organisasi ini. Secara umum MSKK lebih banyak berperan pada masa kedudukan Jepang di Minahasa sementara gereja-gereja tidak banyak melakukan kegiatan. GMIM tidak banyak memberi perhatian pada program yang terkait dengan gerakan ekumene. Sekalipun secara praktis GMIM bergabung dalam MSKK berarti bersama gereja lain (antar denominasi) membangun kerjasama ekumenis dalam bidang kemanusiaan misalnya bersama gereja lain memberi perhatian kepada para

¹³ Sumber Arsip: GMIM, Notulen Sidang Sinode GMIM, 22-23 Agustus 1939. hlm. 53.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Badan Pekerja Sinode GMIM, 1999. *Tata Gereja GMIM tahun 1999*, Tomohon., hlm 3

korban perang, terlibat dalam kegiatan Usaha Pengasih Persekutuan Kristen Selebes.¹⁶ Beberapa tokoh Kristen di Indonesia Timur berpandangan bahwa periode ini adalah periode ekumenis yang ideal karena semua denominasi gereja dikumpulkan dan disatukan dalam satu wadah komunikasi tanpa harus kehilangan identitasnya.¹⁷ Sekalipun kondisi ini cenderung dipaksakan dan mengandung maksud politis dari penguasa pada masa ini GMIM menegaskan bahwa gereja berdiri atas segala ras dan warna kulit tetapi ketetapan dan pernyataan ini tak banyak menolong para pendeta Belanda dari penangkapan untuk menjadi tawanan Jepang. Di pihak lain pernyataan ini menjadi peluang untuk membangun hubungan dengan pemerintah Jepang dan gereja Jepang sehingga gereja Minahasa tetap melaksanakan pelayanan dan panggilannya terhadap jemaat dan masyarakat walaupun biaya pelayanan harus ditanggung dan diusahakan karena hubungan terputus dengan pemerintah dan lembaga pemberi bantuan di Belanda. Menghadapi ini jemaat-jemaat di Minahasa berusaha menopang pelayanan gereja dengan menggalakkan persembahan natura bagi gereja dan para pendeta.¹⁸

Sesudah Jepang menyerah kepada sekutu para pendeta Belanda dibebaskan dari tawanan. GMIM mengadakan ibadah syukur sekaligus perayaan HUT ke -11 GMIM berdiri sendiri. Ibadah syukur ini mempunyai kesan khusus karena menyatukan para pendeta Belanda, Jepang, dan Minahasa dalam kebaktian bersama.

Akibat perang maka banyak pelayanan yang tidak bisa dilakukan secara maksimal karena faktor kekurangan tenaga. Beberapa pelayan kurang memberi perhatian penuh pada pelayanan karena kondisi bahkan ada yang mengundurkan diri. Keadaan ini melahirkan ide bagi Ds. A.Z.R. Wenas untuk meningkatkan pendidikan teologi di Minahasa agar tersedia orang-orang yang dapat membimbing masyarakat Minahasa.

Pada akhir tahun 1945 GMIM kembali menjalin hubungan dengan GPI. Termasuk para pendeta Belanda yang telah dibebaskan dari tawanan. Kehadiran para pendeta Belanda pada periode sesudah kemerdekaan melahirkan masalah baru. Masalah ini terjadi karena dipengaruhi oleh semangat kebangsaan semakin berkobar di kalangan masyarakat dan para tokoh Minahasa. Semangat kebangsaan itu mempengaruhi perjalanan gereja Minahasa. Keinginan untuk bebas menentukan diri sendiri (mandiri) melahirkan penolakan atas kehadiran dan kepemimpinan pendeta Belanda. Menyikapi ini GMIM menegaskan dalam Sidang Sinode tanggal 16-19 bahwa GMIM masih membutuhkan para pendeta Belanda. Pada masa itu GMIM kembali menegaskan ketetapan, bahwa GMIM menekankan keesaan gereja dalam Kristus yaitu GMIM berdiri atas paham kebangsaan. Arus kebangsaan yang sementara berkobar masa itu, kiranya tidak menghalangi keesaan dan kebersamaan dengan para pendeta Belanda. Pada masa ini GMIM semakin aktif menggumuli keterlibatannya dalam gerakan ekumenis baik secara regional, nasional dan internasional. Dalam sidang pertamanya sesudah pendudukan Jepang GMIM membuat program penting tentang gerakan ekumene bahwa Oecumenische Beweging harus segera di wujudkan.¹⁹

Perhatian GMIM terhadap gerakan ekumene diwujudkan dengan mengutus beberapa delegasinya pada konferensi Malino. Konferensi ini dilaksanakan pada 15-25 Maret 1947. Hal-hal yang terkait dengan konferensi Malino, sebelumnya telah dibahas dalam persidangan Badan Pekerja Sinode GMIM tanggal 5 Maret 1947. Pembahasan terarah pada status dan tugas majelis yang akan di bentuk di Malino. Pokok-pokok ini menjadi bahan usulan GMIM dalam konferensi Malino. Hasil keputusan konferensi ini menetapkan salah satu utusan GMIM yaitu Ds. W. J. Rumambi sebagai sekretaris MOBGK. Setahun setelah konferensi Malino pada level gerakan ekumenis internasional GMIM juga

¹⁶ B.B.B. Pandeirot-Lengkong.1993 kehidupan GMIM pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945. hlm 104

¹⁷ P.N. Holtrop. *Op. Cit.*, hlm. 17-16

¹⁸ A. F. Parengkuan. *Op. Cit.*, hlm. 104

¹⁹ Sumber Arsip: GMIM, Notulen Sidang Sinode GMIM 16-19 Juli 1946. hlm. 5.

turut mengambil bagian dalam konferensi Dewan Gereja Dunia pada tanggal 22-23 Agustus 1948 di Amsterdam.

Pada tahun 1949 kondisi baru terjadi pada hubungan dengan pemerintah dalam bidang keuangan. Kebijakan baru dikeluarkan oleh pemerintah dengan mengadakan Pemisahan keuangan antara pemerintah dan gereja. Kebijakan baru ini mempengaruhi program ekumenis GMIM, sebab sejak itu maka GMIM membiayai dirinya sendiri berarti program ekumenis baik secara regional, nasional dan internasional dibiayai dari kas sendiri. Meskipun telah dibicarakan sejak tahun 1949 kebijakan ini nanti direalisasikan pada tanggal 1 Agustus 1951.²⁰ Dengan keadaan ini GMIM secara utuh menjadi gereja mandiri.

GMIM Tahun 1951-1980

Pada periode 1951-1956 ketua sinode GMIM adalah Pdt. M. Sondakh. Pada masa kepemimpinannya dilaksanakan Sidang Sinode pada bulan Juni 1951. Sidang Sinode ini menjadi momen penting karena dihadiri oleh wakil dari gereja-gereja tetangga GMIST dan GMIBM. Ds. W. J. Rumambi sebagai sekretaris DGI masa itu juga turut hadir. Pada saat inilah dibicarakan rencana pembentukan Dewan Daerah DGI di Sulawesi Utara. Rencana ini kemudian direalisasikan di Kotamobagu pada tanggal 17 September 1951. Hubungan ekumenis GMIM dengan DD DGI Sulawesi Utara tidak memutuskan hubungan dengan GPI.

Dengan memelopori berdirinya DD DGI Sulawesi Utara menunjukan bahwa Perhatian GMIM terhadap gerakan ekumenis di Indonesia semakin luas. Kondisi ini juga didukung oleh konsep dan pemikiran utusan-utusan GMIM yang bekerja dan melayani dalam lembaga-lembaga ekumenis di tingkat DGI seperti. Ds. W. J. Rumambi dan Ds. R. M. Luntungan.

Pada tahun 1953 dalam kaitan kerjasama dengan utusan gerejawi dari luar negeri Dr. R. B. Manikam sebagai ketua "Joint Commission" Dewan Gereja-gereja sedunia dan dewan pekabaran Injil internasional dan pimpinan GMIM merumuskan pedoman kerjasama dengan tenaga dari luar negeri. Rumusan itu dihasilkan pada Januari 1953 sebagai berikut:

1. Tenaga dari luar negeri yang dipekerjakan kepada GMIM haruslah mereka yang diutus oleh suatu gereja atau dewan gereja atau juga persekutuan zending.
2. Oknum yang datang bekerja di GMIM itu haruslah memperhatikan pengakuan iman dan pengajaran GMIM
3. Ia memperhatikan kesukaran keuangan gereja dalam GMIM dan ditegaskan bahwa lembaga yang mengutusnyanya membayar gaji yang diatur bersama antara gereja dengan gereja.
4. Tugas dan pekerjaannya dalam GMIM diatur oleh sinode dan dipertanggung jawabkan kepada sinode.
5. Lamanya bekerja didalam GMIM diatur oleh sinode.²¹

GMIM tidak menutup pintu bagi kerjasama ekumenis dengan gereja-gereja atau lembaga di luar negeri. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa sebagai gereja mandiri GMIM mulai menata diri dan memperbaiki kerjasama ekumenisnya. Pengalaman pada masa pekabaran Injil sebelum berdiri sendiri mengajarkan lembaga ini untuk memperbaiki hubungan dengan gereja dan utusan luar negeri sehingga tidak berhadapan dengan masalah dalam hal doktrin dan pelayanan praktis gereja. Dalam posisi ini gereja lokal diberi hak dan tanggung jawab mengatur tenaga dari luar negeri. Terkait dengan tenaga utusan gereja pada tanggal 13-14 Maret 1953 secara internal GMIM mengadakan konferensi bagi para tenaga utusan. Disimpulkan bahwa jemaat-jemaat hendaknya mengambil

²⁰ Ibid.

²¹ A.F. Parengkuan. 1994. *Op. Cit.*, hlm. 124

bagian secara aktif dalam pekabaran Injil secara langsung dan menganggarkan program pekabaran Injil dalam jemaat bukan pada tingkat sinode.

Pada masa pergolakan daerah, GMIM banyak memberi perhatian pada program perbaikan hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Kondisi ketika itu mendorong perhatian lembaga ini pada pelayanan sosial dan kemanusiaan pada masyarakat yang mengalami penderitaan akibat gerakan PERMESTA(1957-1965). Peristiwa penting dalam gerakan ekumenis dan penginjilan di Minahasa terjadi sesudah *Proklamasi Permesta*. Pada tanggal 5 Maret 1957 di Tomohon dilaksanakan konferensi pekabaran Injil sedunia. Kegiatan ini memberi motivasi bagi pengurus dan jemaat untuk memberi perhatian pada program pekabaran Injil, sekalipun di tengah pergolakan daerah Minahasa.²² Usai pergolakan akibat perang saudara perhatian difokuskan pada pemulihan kondisi rakyat Minahasa. Program diarahkan pada perbaikan pendidikan, ekonomi, kesehatan. Tahun 1963 kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor untuk membimbing jemaat dan masyarakat di Minahasa dalam hal pertanian. Tanggal 6 Maret 1963 semua lapisan masyarakat, golongan agama dikumpulkan di gereja Sion Tomohon untuk mendapat petunjuk di bidang pertanian dan disusun dengan pembuatan kebun percobaan untuk melatih para petani .

Tahun berikutnya para pimpinan sinode menyadari bahwa kebutuhan pelayanan dalam segala bidang kehidupan perlu diperhatikan secara kontinyu khususnya bidang teologi. Menjawab tuntutan itu Sidang Sinode GMIM tanggal 16 Desember 1964 memutuskan untuk mendirikan Universitas Kristen pendirian lembaga ini dimaksudkan menjadi *Christian Centre* dalam arti yang luas.²³ Realisasi dari keputusan Sidang Sinode itu dilaksanakan pada 20 Februari 1965 dengan berdirinya Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT). Fakultas Teologia menjadi utama dalam universitas ini. Pendirian Universitas ini juga menjadi tempat pembentukan sikap ekumenis bagi para mahasiswa yang belajar di UKIT. Karena GMIM membuka universitas ini untuk mahasiswa dari daerah Sulawesi dan seluruh Indonesia.

Ekumene mendapat perhatian khusus pada Sidang Sinode ke-55. Sidang ini dilaksanakan pada tanggal 5-11 April 1978. Sidang ini mengangkat tema Masa Depan, Pembangunan, dan Keesaan. Dalam sidang ini ekumene dipahami dalam hubungan dengan pembangunan jemaat dan masyarakat. GMIM memahami bahwa bahwa pembangunan hanya untuk diri sendiri tetapi juga orang lain. Ketetapan ini mengarahkan gereja pada pembangunan yang lebih luas, tidak hanya mencakup wilayah pelayanan internal tetapi di luar wilayah GMIM. Pengembangan pelayanan yang lebih luas tentu terkait dengan kerjasama ekumenis dengan gereja lain.

Dalam bidang kesehatan lembaga ini mengadakan kerjasama dengan gereja-gereja luar negeri diantaranya gereja *Covenant* dan *Brethern* di Amerika Serikat. Dalam kerjasama itu gereja-gereja tersebut mengirimkan tenaga dokter untuk membantu pelayanan kesehatan di poliklinik dan rumah sakit. GMIM menyadari bahwa perlu ada peningkatan bagi tenaga kesehatan yang berasal dari Minahasa sehingga kerjasama untuk peningkatan keahlian dokter dilaksanakan atas kerjasama dengan *Nederlandse Hervomde Kerk (NHK)* di Belanda.²⁴ Perhatian GMIM terhadap pelayanan gereja dan masyarakat tidak mengurangi kepedulian terhadap program oikumenis dalam gereja. Beberapa program ekumene dicetuskan untuk menopang program oikumenis secara internal maupun dengan gereja-gereja tetangga. Diantaranya Pekan ekumene adalah program GMIM yang dilaksanakan pada tahun 1979 dalam rangka pengumpulan dana Sidang Sinode ke IX yang dilaksanakan di GMIM. Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) adalah kerjasama ekumenis yang diprogramkan GMIM dalam bidang kesehatan. Kerjasama ekumenis GMIM semakin berkembang dengan melakukan kerjasama bantuan tenaga medis dengan gereja tetangganya Gereja

²² A.F. Parengkuan. 1994. *Op. Cit.*, hlm. 132

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* hlm. 268-269.

Masehi Injili Bolaang Mongondow (GMIBM).²⁵ Pemberian beasiswa kepada mahasiswa gereja lain merupakan program yang dicetuskan setelah lembaga pendidikan Teologi GMIM. Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa Minahasa yang belajar di UKIT yang berasal dari GMIBM dan gereja lain.²⁶

Sesudah mengalami pergolakan perhatian dalam gerakan ekumenis lebih luas tidak hanya dalam bidang teologia tetapi hingga di bidang lain. Ini membuktikan kesungguhan GMIM untuk menjadi gereja yang tidak hanya berarti bagi kehidupan intern tetapi untuk membawa misi Kristus bagi semua masyarakat di sekitarnya.

Pandangan terhadap gerakan ekumenis dilatari oleh pengalamannya dalam sejarah sebagai gereja yang tumbuh hasil pekabaran zending dari luar negeri, pergolakan yang bersifat nasional dan kedaerahan. Atas dasar pengalaman itu maka lembaga ini memahami bahwa gerakan ekumene semakin kuat jika bertumbuh dari dalam gereja itu sendiri. Bagi GMIM pergerakan ekumene di abad 20 dipahaminya sebagai usaha yang harus dibangun dan bergerak dari bawah ke atas maksudnya dari lokal ke regional dari nasional ke internasional bukan sebaliknya.

TUG dan pengumpulan dana PI

Tugas untuk mengabarkan injil adalah salah satu tugas gereja, dipahami GMIM secara holistik. Panggilan itu bermakna universal untuk menyatakan tanda kerajaan Allah bagi umat manusia secara khusus dalam lingkup nasional. Dalam konteks itu institusi ini berusaha memperlengkapi anggotanya agar berperan dalam membaharui, membangun, dan memelihara keutuhan jemaat GMIM seluruhnya bahkan mengambil bagian dalam upaya mempersatukan gereja di Indonesia dan dunia.

Setiap anggota di dorong untuk menyaksikan dan memberitakan injil lewat perkataan dan perbuatannya dalam pekerjaan serta pergaulan sehari-hari. Sebagai persekutuan dilakukan dalam bentuk usaha-usaha nyata dari persekutuan untuk mengadakan kesaksian dan pemberitaan injil ke dalam maupun ke luar kawasan pelayanan GMIM, berupa penugasan tenaga dan bantuan sumber daya lainnya. Dalam tugas pekabaran Injil itu diusahakan bekerjasama dengan gereja-gereja dan lembaga di Indonesia dan internasional.

Program Tenaga Utusan Gereja mengalami banyak perkembangan. Partisipasi lembaga ini dalam PI dimulai dengan program pengumpulan dana dan ini adalah bentuk keterlibatan jemaat-jemaat secara langsung bagi pelayanan pekabaran Injil. Jemaat-jemaat tidak hanya mengumpulkan dana untuk pekabaran Injil di kalangan orang Minahasa tetapi mulai membuka diri untuk memperhatikan pekabaran Injil di luar tanah Minahasa. Tahun 1865 dari semua dana yang terkumpul dalam jemaat 33,67 persen dipergunakan untuk pekabaran Injil di luar Minahasa.

Jemaat Minahasa mulai tergerak untuk memberi perhatian tak sekedar mengumpulkan dana tetapi mengutus orang Minahasa ke tempat lain sebagai tenaga pekabaran Injil. Motivasi ini direalisasikan pada tahun 1891 ketika mengutus empat pasang suami istri ke tanah Karo. Mereka adalah suami istri Benyamin dan Susana Wenas, Johan dan Penina Pinontoan, Richard dan Sara Tampenawas serta Hendrik dan Mince Pesik. Mereka diutus dalam sebuah kebaktian di gereja Tondano pada tanggal 15 Maret 1891.²⁷ Para utusan injil dipersiapkan dan diseleksi serta memenuhi beberapa persyaratan teknis.²⁸

Perhatian terhadap daerah-daerah pekabaran Injil juga menonjol pada tahun 1934-1936. Pada masa ini perhatian lebih diarahkan pada upaya mengumpulkan kolekte untuk daerah Luwuk dan Banggai

²⁵ Sumber Arsip: GMIM, Notulen 24-26 Maret 1979. *Op. Cit.*, Hlm 149.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ A.F. Parengkuan. 1994. *Op. Cit.*, hlm .39

²⁸ *Ibid.*

dimana dipekerjakan dua pendeta GMIM yaitu Pdt. Tumbelaka dan Pdt. Lumanaw. Ini diakui oleh Ds. A. Z. R. Wenas dalam sebuah pertemuan pada tanggal 14 Juni 1941 di Gereja Tondano. Ia mengatakan bahwa belum secara resmi tugas pekabaran Injil dilakukan sebagai lembaga mandiri tetapi kesadaran dari jemaat untuk memberi perhatian terhadap pekabaran Injil telah tumbuh. Daerah yang menjadi perhatian masa itu adalah Luwuk dan Banggai, Gorontalo, dan Donggala. Secara resmi sebagai institusi tugas pekabaran Injil nanti dilaksanakan pada 1 Januari 1937, sejak Gorontalo dan Donggala ditetapkan sebagai daerah pengutusan GMIM. Tenaga yang bekerja pada waktu itu adalah *Inlandsche Leraar* (Guru Injil pribumi).²⁹ *Berita Gereja* adalah salah satu tabloid yang secara khusus memberitakan tentang pekabaran Injil. Tabloid ini juga menjadi sarana memotivasi jemaat untuk memberi perhatian terhadap pekabaran Injil. A. H. S. Lengkong adalah tenaga utusan pertama ke Paringi dengan biaya yang ditanggung GMIM.³⁰ Untuk menopang pekabaran Injil jemaat-jemaat mengumpulkan dana dalam Minggu pengutusan injil pada tahun 1939 jumlah yang terkumpul untuk menopang pekabaran Injil sebesar 1200,365 gulden dan pada tahun 1940 sejumlah 4919, 345 gulden. Dengan dana ini pada tahun 1941 GMIM mengirim tenaga R. P. H. Ngantung ke Molopoga daerah Parigi dan A. Malonda ke Izimu. Di Ogowe, daerah Toli-Toli diutus Pdt. Walewangko. Ds. A. Z. R. Wenas menegaskan bahwa ada dua hal yang perlu menjadi perhatian jemaat-jemaat dalam rangka mengutus tenaga pekabaran Injil keluar sebagaimana yang di kutip A. F. Parengkuan,

a. Menambahkan dan menaikkan pemberian untuk funds (dana) pengutusan gereja kita. Ditahun 1940, rata-rata setiap anggota jemaat memberikan dana pengutusan injil sebesar satu setengah sen. Karena berbicara di tengah daerah Tondano, maka Ds. A. Z. R. Wenas katakan rata-rata dalam satu tahun, satu jiwa masehi Tondano belum memberikan satu sen bagi penginjilan setahun. Walaupun mungkin ini mengherankan namun itu adalah kebenaran kata Ds. A. Z. R. Wenas. Ucapan ini dimaksudkan agar jemaat merasa terbeban dan bertanggung jawab atas pengutusan injil. Untuk memotivasi jemaat, Ds. A. Z. R. Wenas meyakinkan jemaat bahwa hal menambah dana PI sangat mungkin dilakukan. Ia memberikan gambaran sebagai berikut “Setiap bulan ada tumpukan orang Kristen Minahasa Belanda dan pribumi, walaupun dalam kesukaran dapat mengumpulkan 600 gulden bagi pekabaran Injil. Itu berarti 7200 gulden setahun. Karena itu Ds. A. Z. R. Wenas bertanya kepada jemaat mustahilkan jika jumlah ini dikumpul dalam setahun oleh semua anggota GMIM yang (pada waktu itu) berjumlah sekitar 280.000 jiwa?

b. GMIM menerima tenaga-tenaga utusan gerejawi dari luar. Oleh sebab itu semestinya GMIM memberikan dengan gratis (artinya dengan biaya GMIM) tenaga-tenaga pendeta ke daerah-daerah pengutusan injil.³¹

Motivasi berupa ajakan bagi jemaat untuk turut terlibat dalam pekabaran Injil disampaikan oleh Ds. A. Z. R. Wenas dengan mengutip Amos 6:1 Wai bagi orang yang senang-senang di Sion (celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion). Ia merefleksikan ayat ini “hal itu dapat terjadi atas kita djika pun senang-senang di Sion, djika kita sudah merasa senang di djemaat-djemaat dan klasisklasis, djika kita sudah merasa senang di geredja-geredja kampung kita”. Untuk memperkuat jemaat-jemaat agar memperhatikan tugas pekabaran Injil adalah perwujudan tugas panggilan gereja kepada sesama yang membutuhkan penghiburan, kekuatan, dan kabar baik Ds. A. Z. R. Wenas menjelaskan dan memberi interpretasi pada Matius 9:36, ia mengatakan bahwa Yesus berjalan mengelilingi segala negeri dan kampung mengajar segala rumah sembayang sambil mengabarkan injil kerajaan Allah,

²⁹ Hal ini diberitakan dalam Surat Chabar Masehi Minahasa, No 2 tahun 1, halaman 4. Dengan mengutip pidato ketua Sinode pada waktu itu. Dan diperkuat oleh berita yang sama pada bulan Mei 1937 tentang kunjungan ketua sinode GMIM bersama dengan Ds. Vessem ke Donggala, Buol dan Toli-toli. Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

menyembuhkan yang sakit dan memperhatikan orang banyak yang terserak bagaikan kawanan domba tak bergembala.

Tahun 1941 hingga 1945 perubahan politik yang ditandai pergantian penguasa di Indonesia termasuk Minahasa mempengaruhi perjalanan pelayanan tetapi di sisi lain membentuk pola pikir untuk memahami keberadaan gereja secara mandiri dan peran gereja di tengah-tengah masyarakat yang menderita dan bergumul karena perang .

Tentara Jepang yang berkuasa di Indonesia ingin memutuskan, menghilangkan dan membasmi semua yang berhubungan dengan Belanda. Karena itu bantuan dari negeri Belanda di hentikan, para pendeta Belanda ditawan. Sebagai akibat dari kondisi itu hubungan dengan lembaga pemberi bantuan dari Belanda terputus sehingga para pendeta tidak menerima gaji. Para guru bumiputra diberi kebebasan untuk berhenti bekerja sementara waktu. Ada yang harus pulang ke kampung halaman untuk menyambung kehidupannya. Hal yang menarik adalah walaupun jemaat-jemaat di bawah pendudukan Jepang mengalami keadaan yang berat tetapi jemaat-jemaat tetap memberi perhatian pada pendanaan pekabaran Injil. Karena perhatian itu maka dana pengutusan pekabaran Injil berlipat ganda. Seruan Ds A. Z. R. Wenas pada tahun 1941 mendapat respon dari jemaat-jemaat. Data jumlah dana pengutusan injil dari tahun 1942 sampai 1945 sebagaimana yang dikabarkan dalam surat kabar Pelita, tanggal 29 Mei 1946, pada halaman dua sebagai berikut, pada tahun 1942 telah terkumpul dana sebesar 1.705.55 Gulden. Tahun 1943 jemaat mengumpulkan dana sebesar 5.071.84 Gulden. Tahun 1944 dana yang telah terkumpul 7.418.17 Gulden. Setahun kemudian jemaat mengumpulkan dana untuk pekabaran Injil sejumlah 10.159.54 Gulden.³² Peningkatan jumlah dana yang terkumpul untuk pos PI menunjukan bahwa motivasi Ds. A. Z. R. Wenas dipahami dan direalisasikan dalam jemaat-jemaat GMIM. Realisasi ini membuktikan perhatian jemaat sangat besar terhadap pelayanan gereja diluar wilayah Minahasa.

Sesudah kemerdekaan pekabaran Injil semakin berkembang. Dua utusan pekabaran Injil Pdt. W. F. Makapedua ditempatkan di Donggala dan Pdt. F. H. Mandey di Gorontalo. Mereka diutus melalui ibadah pada tanggal 30 September 1947. Hal yang sama juga dilakukan ibadah pelepasan bagi J. P. Runtukahu di Tomohon, ia di utus ke daerah Palu.

Perhatian besar terhadap pekabaran Injil di daerah luar Minahasa menuai tanggapan baru bahwa dengan mengirim banyak pendeta di daerah luar Minahasa maka mulai terasa kekurangan tenaga pendeta di Minahasa sehingga kebaktian yang di sebut *boras sembahyang* mulai terbelengkalai. Pdt. B. Mundung memberi penjelasan bahwa jika kita hanya memperhatikan kekurangan tenaga itu, maka GMIM hanya melayani orang kristen tua. Ia mengusulkan bahwa pengutusan injil harus segera diatur. Disisi lain dingatkan bahwa mekanisme pekerjaan seorang pekabaran Injil harus diatur sehingga apa yang dilakukan oleh seorang penginjil harus berkelanjutan dan tidak terbelengkalai ketika digantikan oleh penginjil lain. Sekalipun demikian kekurangan tenaga jangan meniadakan tugas pekabaran Injil. Menurutnya kondisi ini perlu didukung dengan doa.³³

Terkait dengan pekabaran Injil, konferensi Gereja dan Zending di Makasar, menghasikan beberapa pokok yang menegaskan tentang kebebasan beragama dan mengusahakan agar negara adalah negara hukum yang memberi ruang pada kebebasan beragama seperti yang ditafsirkan dalam *Statement On Religious Liberty* (1944) mengenai kebebasan beragama. Bagi Indonesia penekanan pemahaman ini sangat penting karena Indonesia memiliki keragaman atau kemajemukan latar belakang termasuk agama dan kepercayaan.

Perhatian pada pekabaran Injil pada masa itu diwujudkan pada perayaan GMIM bersinode ke-25 pada tanggal 19 Agustus 1959. Ds. A. Z. R. Wenas mengeluarkan surat pengembalaan untuk

³² A.F. Parengkuan. 1994. *Op. Cit.*, hlm. 48-49

³³ *Ibid.*

semua jemaat. Salah satu penyampaian dalam surat pengembalaan itu, mengatakan bahwa telah seperempat abad GMIM bersinode, kiranya tugas pekabaran Injil diberi perhatian, karena pekabaran Injil melampaui batas-batas daerah. Pada bulan juni 1960 diadakan pekan pekabaran Injil, pengumpulan dana belajar dan Pembangunan pendidikan Teologia GMIM.

Pekabaran Injil di Minahasa terus menerus dipelihara dan semakin berakar dengan hadirnya evangelis Drs. L. Bella yang mengisi acara kerohanian melalui RRI Manado. Tugas ini kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh Karel Lasut dan J. Marentek dengan mendirikan Radion Sion Tomohon yang berpusat di bukit Inspirasi Tomohon.

Kepedulian terhadap program pekabaran Injil semakin menjemaat di kalangan GMIM sehingga mendorong salah satu jemaat memelopori pengutusan seorang pendeta yaitu Pdt. Anna Palit, Sm.Th ke Halmahera. Sebuah perkembangan dalam program pekabaran Injil. Jemaat memberi perhatian langsung dalam kordinasi dengan pimpinan sinode. Periode sebelumnya inisiatif untuk mencari, membiayai tenaga utusan gereja adalah tugas pimpinan sinode tetapi jemaat Bait-Lahim Talete Tomohon telah merintis pola baru dengan memproklamasikan diri sebagai jemaat yang missioner.

Tenaga Utusan Gereja (TUG) adalah salah satu program yang sudah lama ada bahkan sebelum GMIM melembaga. Pada mulanya tugas ini dilakukan bagi daerah-daerah yang kekurangan tenaga pendeta atau merintis daerah pelayanan baru. Pada sekitar tahun 60-an setelah beberapa daerah pelayan resmi menjadi jemaat dan sinode mandiri maka tugas pekabaran Injil di daerah tersebut menjadi tugas kerjasama antar gereja. Program ini semakin berkembang seiring dengan berkembangnya kerjasam ekumenis di indonesia

Tahun 70-an sampai 80-an ada banyak pendeta yang menjadi Tenaga Utusan Gereja GMIM yang diutus di berbagai penjuru Indonesia bahkan sampai keluar negeri.³⁴ Program Tenaga Utusan GMIM dipahami dalam dua pengertian. Pertama, Tenaga Utusan Gereja yang ditugaskan pada gereja yang mandiri dan sebuah lembaga gereja. Hal ini dipahami sebagai implemmentasi dari kerjasama ekumenis antar gereja atau lembaga. Kedua, Tenaga utusan gereja diutus ke suatu daerah yang belum ada gereja yang berdiri. Tugas ini disebut sebagai tenaga pekabaranInjil.

Peranan GMIM Dalam Gerakan Keesaan Di Indonesia

GMIM dalam perwalian GPI 1934-1941

Gereja Protestan di Indonesia (GPI) melanjutkan pemeliharaan jemaat-jemaat Protestan di Indonesia dibawah pengawasan Negara. Sebagai gereja yang berada dalam pengawasan pemerintah, GPI berupaya menyatukan gereja-gereja yang beraliran reformasi di Indonesia. Sistem dan pengorganisasiannya diintegrasikan dalam sistem pemerintah. GPI membiayai kehidupan para pendeta dalam lingkungannya sehingga para pendeta menjadi pegawai pemerintah. Para pendeta diangkat dan diawasi oleh pemerintah melalui GPI. Dalam tanggung jawab itu oleh beberapa tokoh menganggap bahwa GPI adalah gereja Negara atau gereja Kolonial.³⁵

Tugas pelayan dan peranan GPI dibahas dalam sidang tahun 1916 dan 1933. dalam sidang itu para utusan sidang menyikapi perkembangan yang terjadi dalam lingkungan gereja-gereja anggotanya dan melakukan perbaikan dalam sistem organisasi. Perbaikan itu bertujuan agar GPI bisa menjadi gereja kesatuan di Indonesia. Perubahan terus menerus di bahas dalam sidang berikutnya pada tahun 1936, 1939, dan 1948. Perbaikan pada tata gereja GPI, sebelumnya menganut sistem organisasi yang hirarkis dalam jabatan-jabatannya. Melalui sidang-sidang itu GPI merubah sistem

³⁴ Ibid.

³⁵ G.P.H. Locher. 1995. *Tata Gereja Protestan Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia) Hlm .312

ke arah ciri gereja reformasi. Begitu pula misi, hubungan jemaat setempat dan gereja secara keseluruhan dibawa dalam sistem presbiterial sinodal.

Dalam usahanya menyikapi konteks masa itu, dimana gereja-gereja berada dalam semangat gerakan ekumenis. GPI berusaha menjadi gereja kesatuan yang meliputi semua gereja protestan di Indonesia termasuk gereja-gereja hasil zending.³⁶ Konsep gereja kesatuan ternyata tidak bisa diterima oleh gereja-gereja anggota karena masing-masing telah membentuk komisi tata gerejanya sendiri seperti GMIM dan GMIT.³⁷ Keadaan ini mendorong GPI untuk mengkaji kembali tata gerejanya dalam sidang gereja Am pertama di Jakarta tanggal 20-30 Mei 1951. Pada sidang ini lahirlah tata gereja GPI dan peraturan sidang gereja Am GPI yang diterbitkan pada Oktober 1952. Tata ini menjadi landasan pemahaman GPI untuk tidak membentuk Gereja kesatuan tetapi memperjuangkan Gereja yang esa melalui DGI. Pengaruh GPI terhadap perkembangan DGI, tampak pada kesamaan konsep ekumenis gereja daerah atau wilayah. Konsep kerjasama gereja-gereja wilayah telah diangkat dan diusulkan Ds. W. J. Rumambi dalam sidang Gereja Am pertama 1951. Konsep ini juga dikembangkan dalam program keesaan DGI. Perkembangan yang terjadi dalam GPI juga turut mempengaruhi perjalanan sejarah GMIM sebagai salah satu gereja yang berada dalam perwalian GPI, bersama gereja lain yaitu GMIT dan GPM. Para tokoh GMIM memberi pengaruh kuat terhadap perkembangan GPI sebaliknya juga GPI dalam berbagai kebijakan mempengaruhi perkembangan GMIM termasuk pengkajian dan pengkaderan para pemimpinnya.

Hubungan antara GMIM dan GPI dilihat sebagai hubungan antara kakak dan adik. GPI sebagai gereja tua yang dibentuk oleh pemerintah Belanda dan GMIM sebagai gereja muda diberi kebebasan untuk mencari pola sendiri dalam menata jemaat-jemaatnya. Dalam konteks gereja yang berada dalam perwalian tentu memegang aturan-aturan dalam GPI. Struktur kepengurusan masih terkait dengan GPI yang berpusat di Batavia.

Sejak penyerahan GMIM pada GPI tahun 1880. Dominasi GPI jelas mempengaruhi struktur kepengurusan tingkat sinode, klasis, dan jemaat GMIM. Dari sepuluh klasis hanya dua klasis yang dipimpin oleh pendeta Minahasa yakni klasis Sonder dipimpin oleh Pdt. B. Mundung dan klasis Tomohon dipimpin oleh Ds. A. Z. R. Wenas. Peraturan pokok gereja Minahasa hanya dapat diubah dengan persetujuan Sinode Am. Penempatan para pendeta termasuk Indische-Predikant menjadi wewenang pengurus gereja termasuk penunjukan ketua sinode dan rapat-rapat klasis kecuali pengelolaan aset gereja berupa dana dan harta milik gereja bukan kewenangan pengurus gereja. Kondisi ini menimbulkan masalah bagi para pendeta. Masalah dipicu oleh semakin berkembangnya pemahaman berorganisasi pendeta-pendeta Minahasa. Sikap ini ditunjukkan lewat beberapa kritikan tajam Ds. A. Z. R. Wenas mewakili para pendeta Minahasa dan utusan-utusan sinode terhadap penunjukan pejabat di klasis. Ujian ulang yang dilaksanakan ulang oleh kerkebeksuut seolah-olah ujian yang dikerjakan oleh pendeta Minahasa tidak betul di School toot Opleiding van Inlands Leraren (STOVIL). Kritik itu disampaikan kepada ketua sinode masa itu yaitu Ds.E.A.A. De Vreede.³⁸ Latar belakang sikap ini karena keinginan para tokoh gereja agar gereja ini benar-benar berdiri sendiri secara struktur dan fungsi. Persoalan ini meluas pada ketegangan antara para pendeta asal Minahasa dan pendeta asal Belanda. Dr. Slotemaker de Bruine diutus untuk menyelesaikan masalah ini. Pertemuan yang dilakukannya dengan para anggota sinode menghasilkan kesepakatan bahwa para pendeta Minahasa diberi tempat untuk menjadi anggota sinode, menjadi ketua dalam jemaat dan klasis. Untuk ini maka perlu mempersiapkan para pendeta dalam pendidikan teologi.

Ide untuk memberi tempat dan kesempatan bagi para pendeta Minahasa juga didukung oleh Pdt. Nieuwpoort. Sebelumnya ia telah berbeda pandangan dengan Ds. Buenk dan Ds. E.A.A. De Vreede.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

³⁸ A.F. Parengkuan. 1994. *Op. Cit.*, hlm. 81-82

Banyak para pendeta yang mendukung pandangan Pdt. Nieuwpoort. Akibat dari pandangan itu maka ia dipindahkan ke Yokyakarta. Di pihak lain kehadiran para pendeta Belanda di Minahasa disikapi Ds. B. Mundung sebagai bentuk keesaan Kristiani. Ia berpandangan bahwa Kristus sebagai kepala gereja dan denganNya pandangan tentang perbedaan kebangsaan jatuh.³⁹ Sikap terbuka yang ditunjukkan oleh anggota-anggota sinode terhadap kehadiran para pendeta Belanda tidak menyebabkan pertentangan yang tajam. Justru ada pendeta Belanda yang berkata bahwa biarlah pendeta Belanda bekerja dan dipandang sebagai anak bumiputra untuk keselamatan tanah Minahasa. Ada banyak suara-suara yang diwarnai oleh kebangsaan sering muncul dalam persidangan sinode tetapi anggota-anggota sinode berusaha untuk tidak mempolitisir keadaan dalam jemaat, melainkan menempatkannya dalam visi teologis terutama menempatkan peran warga gereja Minahasa untuk memajukan GMIM.

Kabar tentang perang di Eropa semakin kuat terdengar hingga di Minahasa. Keadaan ini mempengaruhi kehadiran para pendeta berkebangsaan Belanda di Indonesia termasuk di Minahasa. Karena itu dalam rapat 24 november 1941 yang dipimpin ketua sinode Ds. G. P. H. Locher menegaskan apa yang telah disampaikan oleh Pdt. Herwerden bahwa anggota sinode harus mendukung Ds A. Z. R. Wenas dalam kepemimpinannya sebagai ketua II terpilih, bila nanti kepemimpinan sinode harus di emban oleh pendeta Minahasa. Keadaan berubah setelah pendudukan Jepang di Indonesia termasuk di Minahasa. Perkembangan selanjutnya sesudah pendudukan Jepang di Minahasa GMIM menjurus pada upaya mengakhiri perwalian GPI.⁴⁰ Pada masa peralihan kekuasaan pengurus sinode telah mempersiapkan struktur kepengurusan GMIM.

GMIM Pada Masa Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang, daerah Minahasa mengalami banyak kesulitan dan pergumulan. GMIM sebagai salah satu gereja di Minahasa juga menghadapi keadaan yang berbeda pada masa sebelumnya. Para tokoh agama mengalami ujian berat disisi lain kondisi ini kondisi ini merupakan harapan para tokoh GMIM karena kepemimpinan secara penuh ditangani para pendeta Minahasa. Masa pendudukan Jepang telah mendewasakan para pemimpin dan jemaat GMIM dalam berbagai aspek pelayanan termasuk pandangan ekumenisnya, karena pada masa ini bersama-sama gereja lain di Minahasa menghadapi keadaan warga jemaat dan masyarakat yang terpuruk akibat perang.

Ds. A. Z. R. Wenas menjadi pimpinan sinode di masa pendudukan Jepang. Masa ini gereja menghadapi tantangan berat sebab ekspansi Jepang dalam berbagai bidang kehidupan masarakat Minahasa termasuk kehidupan gereja. GMIM menyadari bahwa dukungan perhatian dan bantuan dari Belanda serta lembaga donatur dari Belanda masih diperlukan karena itu, dalam upaya menolong dan menyelamatkan para pendeta Belanda, GMIM menegaskan bahwa gereja Minahasa tidak berdiri atas satu suku tetapi berdiri di atas segala ras dan warna kulit. Sekalipun pernyataan ini tidak dapat menyelamatkan pendeta-pendeta Belanda dari penangkapan tentara Jepang. Hubungan ekumenis dengan gereja-gereja, lembaga dan utusan dari Belanda terputus.⁴¹

Hubungan kerjasama antar gereja di Minahasa terbangun akibat pendudukan Jepang. GMIM terhubung dengan gereja lain di Minahasa melalui Majelis Agama-agama di Selebes Utara (*Kita Selebes Syu Kyodan*) dan Persatoean Agama Kristen Selebes Oetara (PAKSOE). Pada kedua organisasi ini semua gereja dipersatukan. Wadah ini adalah badan kerjasama yang dibentuk oleh Jepang untuk menjaga ketentraman di Minahasa. pernyataan kerjasama semua gereja termasuk Minahasa dalam organisasi ini dibacakan oleh Wenas.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ G. P. H. Locher. 1995. *Op. Cit.*, hlm.132-133

⁴¹ A.F. Parengkuan. 1994. *Op. Cit.*, hlm 104

*“Kami menjatakan terimakasih kami dengan seboelat2 hati atas pendirian perkoempoelan Persatoean Keristen Menado Syu serta berdjandji dan bersoempah akan bekerja bersama2 dengan pelayan2 agama dan anggota-geredja yang tergabung dalam persatoean ini. Beralas pada iman indjili maka kami hendak beroesaha hidup tawakkal kepada Allah dan melajani manoesia oentoek mendjadi bala rakyat jang ta'at kepada Dai Nippon Taikoku dan oentoek mentjapai kemenangan peperangan Asia Timoer Raja”.*⁴²

Kondisi masa itu membuat gereja-gereja membuat pernyataan yang bersifat politis. Pernyataan itu bertujuan, pertama untuk mengamankan atau melindungi gedung gereja agar tetap ada. Kedua, agar kegiatan beribadah dan pelayanan sosial gereja lainnya tetap dilaksanakan meskipun dalam keadaan yang sulit. Pernyataan dibuat oleh Ds. Hamazaki dalam bahasa Jepang. Alasan mengapa pernyataan ini dibacakan oleh Ds. A. Z. R. Wenas, menurut Pdt. S. Kaligis yang mengalami langsung kehidupan politik pada masa pendudukan Jepang, tentara Jepang bergiat melakukan penutupan tempat ibadah masa itu, tindakan orang Jepang memberikan kesan pada orang Minahasa bahwa isu bahwa tentara Jepang tidak mengenal agama adalah benar. Ds A. Z. R. Wenas berusaha meyakinkan Pemerintahan sipil Jepang tentang GMIM dan memohon agar kepada gereja-gereja Kristen diberikan dua hal, yakni:

1. Kesempatan untuk menjalankan tugas ibadahnya
2. Kebebasan untuk menjalankan panggilannya

Kedua permohonan ini diperoleh dengan syarat harus menyokong usaha-usaha dan maksud pemerintah untuk memenangkan perang dan membangun suatu Asia Timur Raya yang kuat, tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban umum, terutama tidak menjadi mata-mata musuh.⁴³

Perjanjian untuk ikut serta dalam menjaga ketertiban dan menyokong usaha pemerintah Jepang dalam kemenangan perang bukan dalam pengertian politis bahwa gereja menjadi pengikut Jepang tetapi memberi bantuan dalam hal kemanusiaan. Sebab dalam program GMIM yang tercatat dalam arsip disampaikan kepada pemerintah Jepang antara lain dikatakan bahwa “*Geredja Keristen di Selebes Oetara terpanjang mengerdjakan pekerjaan2 yang tjotjok dengan pendirianya selalu gereja jang mengakui Toehan Jesoes Keristoes selakoe kepalanya.*”⁴⁴ Mengenai sokongan GMIM untuk memenangkan perang berpusat pada usaha kemanusiaan. Hal itu dirumuskan sebagai berikut

- Geredja Keristen memberikan dimana perloe peroesahaa2nja, roemah2 geredjanja kepada pemerintah oentoek dipakai selakoe roemah2 sakit. Ataoe jang kena loeka oleh peperangan.
- Geredja Keristen beroesaha soepaja roemah2 pengantar agama beralaskan pada kemampoeanja, melajani tentara di roemahnja setjara Keristen.⁴⁵

Jelas bahwa tokoh-tokoh itu bersusaha menempatkan gereja dan misi di tengah pergumulannya pada masa pendudukan Jepang di daerah Minahasa. Dalam perjalanannya MSKK berfungsi sebagai media atau perantara gereja-gereja dengan pemerintah Jepang dan masing-masing gereja. Melalui MSKK gereja-gereja memberikan informasi atau keterangan mengenai organisasinya.

GMIM dan GPI Sesudah Kemerdekaan

Hubungan GMIM dan GPI kembali terjalin setelah Jepang dikalahkan oleh sekutu. Para pendeta Belanda dibebaskan dari tawanan, jemaat menyambut para pendeta ini dalam suatu ibadah syukur

⁴² Ibid., hlm. 106

⁴³ Ibid., hlm. 107

⁴⁴ Ibid. hlm. 108

⁴⁵ Ibid.

yang digabung dengan HUT GMIM yang ke-11. Dalam ibadah syukur itu para pendeta Jepang, Belanda, dan Minahasa hadir. Sejak akhir tahun 1945 GMIM kembali berhubungan dengan GPI karena telah terbentuk sinode Am yang baru di Jakarta. GMIM mengambil sikap untuk tetap menggunakan aturan-aturan yang ada sebelum ada aturan baru. Kewajiban finansial pada masa sebelum pendudukan Jepang diserahkan kepada pemerintah Indonesia Serikat (RIS). Dengan itu maka para pendeta GMIM dibayar oleh Negara. Keadaan ini berlangsung hingga pada bulan agustus 1950 karena terjadi pemisahan antara gereja dan Negara.

Persoalan lain muncul sehubungan dengan status para pendeta Belanda setelah kemerdekaan. Banyak yang mempertanyakan apakah para pendeta Belanda tetap dipertahankan atau GMIM benar-benar mandiri dengan menghapus hubungan dengan gereja lama? Keadaan waktu itu semakin sulit, karena masyarakat Minahasa sementara berada dalam situasi yang dipengaruhi oleh semangat kebangsaan yang kuat. Para pengurus gereja mengambil jalan tengah dengan tetap memberi kesempatan kepada para pendeta Belanda mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan dengan menduduki tempat sesuai dengan mandat Sidang Sinode tertanggal 19 Juli 1946, bahwa gereja tetap membutuhkan tenaga-tenaga dari luar. Sikap ini di realisasikan dengan menempatkan Pdt. G. P. H. Locher secara khusus menjadi mediator antara GMIM dan *kerksbestuur* serta mendapat tugas memimpin pembentukan badan ekumene yakni *commissie der opprbereiding van oecumenische samenwerking in noord en Midden-Celebes*. Pdt. I. P. C. van't Hof diterima sebagai penasehat sinode khususnya dalam bidang teologi.⁴⁶ Demi kelancaran hubungan dengan para pendeta Belanda maka tata gereja GMIM kembali di revisi, dalam hal kemandirian dan hubungan dengan gereja lama.

Pemikiran ekumene telah tumbuh pada tokoh gereja setelah melewati pergumulan berat. Pdt. A. Z. R. Wenas sebagai ketua sinode menunjukkan ketidak setujuannya atas pandangan GPI yang kurang setuju pada pendirian sekolah teologi di Indonesia Timur. Ketidaksetujuan *kerksbestuur* terkait dengan penunjukan Dr. Bergema yang beraliran gereformeerd sebagai Kurator.⁴⁷ Pendapat Ds. A. Z. R. Wenas menegaskan bahwa GMIM mewakili gereja-gereja muda di Indonesia mulai mengarah dan terbuka pemikirannya terhadap usaha ekumenis gereja-gereja untuk menyokong pembentukan suatu dewan gereja di Indonesia.

Peranan tokoh GMIM dalam GPI melalui pemaparan konsep ekumenisnya tentang status GPI terhadap gereja anggotanya. Konsep ini disampaikan dalam rapat GPI III di Bogor. Isi konsep itu adalah gereja-gereja yang berada dalam lingkup GPI yaitu GMIM, GPM, GMIT, GPIB. Gereja anggota adalah gereja-gereja yang berdiri sendiri tetapi berada tetap berada pada kesatuan yang berbentuk federasi dalam GPI. Di usulkan bahwa keempat gereja inilah yang seharusnya memilih *kerksbestuur*.⁴⁸ Sesudah itu dalam rapat GPI pada tahun 1949 pembicaraan tentang pemisahan keuangan dengan gereja telah dibicarakan. Realisasi pemisahan keuangan itu dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1950.

Sesudah pemisahan keuangan GMIM mengutus Ds. R. M. Luntungan untuk menjadi pimpinan GPI sekalipun ia juga terpilih dalam Sidang Sinode 15-17 Mei 1956, tetapi karena ia juga masih berstatus sebagai ketua Badan Pekerja Am GPI maka GMIM memberi keluasaan untuk melaksanakan tugas hingga selesai masa jabatan itu. Untuk mengisi kekosongan pimpinan sinode terpilih, maka Ds. R.M Luntungan digantikan oleh Ds. A.Z.R.Wenas sebagai wakil ketua memimpin GMIM.

⁴⁶ ibid

⁴⁷ Sumber Arsip: GMIM, Notulen Sidang Sinode GMIM.16-18 Desember 1947. hlm.15.

⁴⁸ A. F. Parengkuan. 1994. *Op. Cit.*, hlm 97-98

Peranan Pengurus GMIM Dalam Pembentukan DGI.

Benih-benih kesadaran ekumenis tumbuh di Minahasa tak lepas dari peranan tokoh-tokoh Minahasa, diantaranya Ds. A. Z. R. Wenas. Dalam tulisan Ds. R. M. Luntungan tentang Ds. A. Z. R. Wenas dijelaskan bahwa kehidupan organisasi dan peranannya terhadap kepemimpinan dipengaruhi oleh semangat kebangsaan yang saat itu berkembang di Indonesia.⁴⁹ Ia adalah pribadi yang berjuang gigih bergumul untuk tegak berdirinya gereja-gereja daerah dalam lingkungan Gereja Protestan di Indonesia. Pemikiran ekumenisnya telah diimplementasikan melalui penugasannya sebagai direktur STOVIL sejak tanggal 10 Agustus 1928. Ia membuka pintu bagi calon pemimpin di daerah seperti Sangir Talaud, Bolaang Mongondow, Palu, Donggala, Luwuk Banggai atau Poso-Tentena, dan daerah lain untuk belajar di STOVIL.⁵⁰ Konsep ini, dijiwai oleh pandangannya bahwa gereja-gereja harus tegak berdiri di daerah-daerah (*regionale kerk*) tetapi harus tetap berada dalam ikatan bersama. Untuk itu perlu ada pusat pendidikan para pendeta yang menjadi pemimpin di daerah-daerah. Keadaan itu juga yang mendorongnya untuk mendirikan sekolah tinggi teologia untuk menggantikan STOVIL ketika ditutup.⁵¹ Ia sangat setuju dengan usaha berdirinya berdirinya HTS di Bogor pada tahun 1934.

Dukungan GMIM terhadap gerakan ekumenis dunia adalah mengutus Ds. B. Mundung mengikuti konferensi IMC di Tambaram pada tahun 1938 bersama 14 orang utusan lainnya. Pengutusan Ds. B. Mundung memberi dampak yang sangat penting dalam pemikiran dan konsep ekumenis di Minahasa. Salah satu peranan Ds. B. Mundung terkait dengan gerakan ekumenis, ketika terjadi persoalan antar para pendeta Minahasa dan pendeta Belanda sesudah kemerdekaan. Semangat kebangsaan yang bergelora dalam masyarakat Minahasa mempengaruhi pemikiran gereja dalam membenahi organisasi. Ds. B. Mundung memberi solusi bahwa kehadiran para pendeta Belanda di Minahasa harus dilihat dari terang keesaan didalam kristus yang mana di dalamnya semua bangsa terhisab. Dengan pemikiran ini ia ingin menjelaskan bahwa didalam gereja tembok pemisah karena bangsa, suku, warna kulit dirobuhkan sehingga semua bersekutu didalam gereja sebagai bagian dari tubuh Kristus.

Sesudah kemerdekaan, pada sidang pertama dibahas program yang terkait dengan ekumene yaitu oecumenische bewenging. Konsep ini yang dianjurkan oleh Ds. G. P. H. Locher. Dalam keputusan Sidang Sinode GMIM disebutkan bahwa sinode akan berusaha sekuat mungkin agar Oecumenische Bewenging (gerakan keesaan) segera diwujudkan.⁵²

Pada masa ini kedua tenaga GMIM yang telah diutus ke HTS Bogor telah menyelesaikan studinya. W. J. Rumambi dan R. M. Luntungan. Keduanya turut mengambil bagian dalam pelayanan terutama berperan dalam gerakan ekumenis. Ds. R. M. Luntungan dan GPI banyak terlibat dalam kegiatan PAKSOE di masa pendudukan Jepang dan Ds. W. J. Rumambi sangat nampak peranannya dalam Madjelis Oesaha Bersama Geredja-Geredja Keristen (MOBGK) dan persiapan pembentukan DGI.

Di konferensi Malino, para utusan GMIM adalah Ds. W. J. Rumambi, Ds. R. M. Luntungan, Pdt. M. Sondakh, L. P. Rumokoi.⁵³ Ds. W. J. Rumambi dipilih melaksanakan tugas sebagai sekretaris MOBGK. Keterpilihannya menurut catatan DR. P. N. Holtrop adalah sebuah kelayakan karena ia menjadi motivator yang menyebabkan konferensi ini dilaksanakan. Rencana pelaksanaan konferensi Malino ini telah digagas oleh Ds. W. J. Rumambi bersama Pdt. E. Dukstra dari GMIT, dan Pdt. F.

⁴⁹ R.M.Luntungan, 1969, "Ds.A.Z.R. Wenas dan Geredja2 Daerah" (beberapa catatan). Diterbitkan dalam bulletin DGW.SULUTTENG. Tomohon. hlm.16

⁵⁰ R. M. Luntungan. *Op. Cit.* hlm. 18

⁵¹ *ibid*

⁵² Sumber Arsip: GMIM, Notulen GMIM pada 16-19 Juli 1946. *Op. Cit.*, hlm.5

⁵³ *ibid*

H. de Fretes dari GPM. Mereka mengumpulkan para peserta gereja-gereja dari Indonesia Timur setelah konferensi pekabar-pekabar injil di Jakarta pada tanggal 10-20 Agustus 1946. Ds. W. J. Rumambi menyampaikan rencana usaha persiapan Konferensi Makasar. Yang akan dilaksanakan pada bulan Maret. Tujuan konferensi Makasar adalah untuk menyatakan keesaan gereja-gereja dan bakal-bakal gereja di Indonesia bagian timur, selaku cabang atau cabang-cabang dari Balai Gereja Kristen di Indonesia.⁵⁴ Pada bulan Januari 1947 Ds. W. J. Rumambi dan DR. Bergema bekerjasama merealisasikan rencana persiapan konferensi Malino pada bulan Maret 1947.

Konferensi Malino dilaksanakan pada tanggal 15-25 Maret 1947. Konferensi ini menghasilkan pokok-pokok penting yang terkait dengan persiapan gerakan keesaan di Indonesia. Salah satu hasilnya adalah didirikan suatu Dewan Gereja setempat yang merangkum semua gereja di Indonesia Timur sekaligus menempatkan dirinya sebagai cabang dari dewan gereja di seluruh Indonesia yang akan didirikan nanti. Dalam konferensi ini berdiri Madjelis Oesaha Bersama Geredja-Geredja Keristen (MOBGK) di Indonesia. Lembaga ini kemudian disingkat dengan Majelis Kristen.⁵⁵ Pada konferensi ini diputuskan untuk mendirikan sekolah pendeta untuk daerah-daerah Indonesia bagian timur. Konsep ini sama dengan konsep yang pernah dibuat oleh Ds. A. Z. R. Wenas melalui STOVIL.⁵⁶

GMIM banyak berpartisipasi dalam MOBGK melalui utusannya yang menjabat sekretaris. Ds. W. J. Rumambi sebagai sekretaris MOBGK digantikan oleh Ds. R. M. Luntungan. Pada masa Ds. R. M. Luntungan, ia melukiskan bahwa periode Rumambi adalah masa dimana kegiatan ditekankan pada kegiatan keluar dan pada masanya diprioritaskan usaha konsolidasi dan menegakkan anggota-anggota Madjelis Keristen.⁵⁷ Ds. R. M. Luntungan digantikan oleh Pdt. B. Supit. Secara berurut MOBGK dipimpin oleh para pendeta yang berasal dari Minahasa. Lembaga ini tidak hanya mengutus para pendeta menjadi pengurus dalam lembaga yang memiliki peran ekumenis di antara gereja-gereja di Indonesia Timur tetapi juga memberi perhatian secara finansial bagi pembiayaan ke lembaga ini. Melalui Majelis Kristen dan para utusannya GMIM menyampaikan pemikiran dan konsep ekumenisnya.

Setelah digantikan Ds. R. M. Luntungan di MOBGK, Ds. W. J. Rumambi dipercayakan berkarya di GPI. Dalam lembaga ini, ia menyampaikan konsep konsep keesaan di Indonesia. Pada Sidang Sinode Am GPI pada bulan Juli 1948 dibahas usaha dan peranan GPI ke arah pembentukan dewan gereja di Indonesia. Sidang ini adalah sidang pertama yang dihadiri oleh gereja-gereja dan utusan gereja daerah. Keputusan-keputusan dalam sidang ini tidak bertentangan dengan hasil yang dicapai dalam konferensi Majelis Kristen untuk secepat mungkin membentuk satu majelis gereja-gereja di seluruh Indonesia.⁵⁸ Salah satu langkah kearah itu adalah keputusan pembaharuan susunan Gereja Protestan di Indonesia.⁵⁹ Dalam sidangnya, Ds. A. Z. R. Wenas yang menentang pola pemikiran bahwa GPI menjadi gereja kesatuan. Menurut Ds. A. Z. R. Wenas GPI tidak dapat menjadi gereja kesatuan tetapi tempat gereja-gereja anggotanya saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Dengan demikian masing-masing gereja di beri kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Ia mengusulkan agar GPI menggunakan bentuk federasi.⁶⁰ Konsep pemikiran Ds. W. J. Rumambi

⁵⁴ P. N. Holtrop. *Op. Cit.*, hlm. 18

⁵⁵ *ibid*

⁵⁶ Bdk. Ds. R. M. Luntungan. *Loc. Cit.* Dijelaskan bahwa pandangan dan pemikiran Ds. A. Z. R. Wenas tentang gereja-gereja daerah harus memiliki pemimpin-pemimpin. Untuk itu para pemimpin perlu diberi pendidikan karena itu ia membuka pintu bagi para pemimpin dan calon gereja di daerah-daerah untuk belajar di STOVIL.

⁵⁷ P. N. Holtrop. *Op. Cit.*, hlm. 42

⁵⁸ Chris Hartono. *Op. Cit.*, hlm 68.

⁵⁹ G.P.H. Locher. 1995. *Op. Cit.*, hlm. 314-315

⁶⁰ Sumber Arsip: GMIM, Notulen Sidang Sinode GMIM 19-20 Mei 1948. hlm 10-11

tentang gereja-gereja wilayah telah diungkapkan dalam Sidang Sinode Am tahun 1951 juga menjadi konsep yang di terapkan dalam DGI.⁶¹

Setelah sidang Am GPI pada bulan Juli 1948 beberapa utusan mengikuti sidang DGD I di Amsterdam tanggal 22 Agustus - 4 September 1948, salah satu utusannya adalah Ds. W. J. Rumambi. Kehadiran dalam sidang itu memotivasi mereka untuk mengambil langkah lanjut kearah konferensi pembentukan Panitia Perancang. Konferensi tersebut dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 6-13 November 1949. Kondisi negara masa itu tidak memungkinkan pembentukan DGI tetapi lewat pertemuan itu ditetapkan bahwa pada bulan Mei akan dilaksanakan konferensi pembentukan DGI. DGI berdiri pada tanggal 25 Mei 1950 dalam konferensi pembentukan yang dilaksanakan di STT Jakarta pada tanggal 21-28 Mei 1950. Ds. W. J. Rumambi terpilih menjadi sekretaris pertama dalam DGI.

Sesudah pembentukan DGI pada tahun 1951 di bentuk dewan daerah Sulawesi utara sebagai cabang dari PGI di lingkungan Sulawesi utara, tengah dan tenggara. Pembentukan ini berawal dari kesepakatan tiga sinode yang mengadakan pertemuan di Tomohon pada 23 dan 26 Juli 1951. Dalam pertemuan para peserta merencanakan untuk membentuk Dewan Daerah Gereja-gereja Indonesia (DD DGI) Sulawesi Utara (masa itu sampai di Sulawesi Tengah). Pertemuan itu hadir oleh Ds. W. J. Rumambi selaku sekretaris DGI sedangkan Ds. A. Z. R. Wenas ditugaskan menjadi penghubung dan mengundang gereja-gereja anggota DGI untuk menghadiri konferensi pembentukan di Kotamobagu (GMIMB).

Konferensi Kotamobagu dilaksanakan pada 16-20 September 1951 dihadiri GMIST, GMIM, GMIMB dan GKST. Konferensi ini menghasilkan DD DGI yang dicetuskan pada 17 September 1951. Maksud dan tujuannya adalah melaksanakan maksud DGI untuk melaksanakan keesaan Gereja Kristen di Indonesia. Pengurus DD DGI yang terpilih adalah Ds. A. Z. R. Wenas sebagai ketua, Ds. R. M. Luntungan sekretaris.⁶²

Peranan GMIM Sesudah Pembentukan DGI Hingga Tahun 1980

Sesudah terbentuknya DGI, GMIM tetap aktif dalam kegiatan-kegiatan GPI. Beberapa pendeta GMIM dipilih menjadi pimpinan GPI dalam periode ini diantaranya Ds R.M.Luntungan. dalam sidang sinode yang dilaksanakan pada tanggal 15-17 Mei 1956 sebenarnya ia yang terpilih karena waktu itu masih menjabat sebagai ketua GPI maka ia gantikan oleh Ds. A. Z. R. Wenas sebagai wakil ketua. Sikap peserta sidang menerima keadaan ini menunjukkan sikap keterbukaan GMIM dalam kehidupan ekumenisnya.

Peristiwa penting lain dalam kaitannya dengan kehidupan ekumene dengan gereja lain yaitu pengresmian tiga daerah penginjilan GMIM menjadi gereja yang berdiri sendiri yakni Gorontalo, Toli-Toli dan Donggala/Palu pada akhir tahun 1946. Acara pengresmiannya dilaksanakan di gedung gereja GMIM Sentrum Manado pada tanggal 18 Desember 1964.⁶³

Setelah menyelesaikan tugas sebagai ketua GPI Ds. R. M. Luntungan kembali ke GMIM, ia memulai tugasnya dengan melakukan perbaikan ekonomi dan stabilitas politik. Sebagai ketua Sinode sekalipun dalam keadaan sakit ia tetap memberi perhatian pada kehidupan terutama peran dalam gerakan ekumenis. Pada Sidang Sinode ke-56 di Tosuraya beliau tidak sempat hadir karena sakit dan di rawat di Jakarta. Melalui telegram ia sempat mengirimkan pesannya kepada para peserta sidang, agar orientasi ke jemaat-jemaat serta pengkaderan di semua tingkat hendaknya dilakukan dalam semangat bersama-sama dengan keesaan gereja Kristus. Ia juga mengingatkan bahwa mengikut Kristus selalu berarti resiko dan pengorbanan, namun gereja adalah persekutuan para pelayan dalam

⁶¹ G.P.H. Locher. *Op. Cit.*, hlm. 316

⁶² Panitia pelaksana Tahun 2009, Sidang Am Gereja Sulawesi Utara Tengah. hlm. 1-2

⁶³ A.F. Parengkuan. 1994. *Op. Cit.* ,hlm. 101-102

pengharapan pagi yang baru.⁶⁴ Dalam kalimat-kalimat Ds. R. M. Luntungan berisi semangat ekumenis yang sangat kuat. Hal ini tentu dilatarbelakangi oleh tanggung jawab sebelumnya sebagai pimpinan dalam lingkungan GPI. Ia juga sangat menyadari bahwa pada masa itu anggota jemaat GMIM sementara mempersiapkan diri untuk menjadi pelaksana sidang Raya DGI ke X. Peristiwa ini adalah menjadi kebanggaan warga jemaat sehingga mereka bersedia untuk berkorban. Kebanggaan yang dimaksud di sini berhubungan dengan kesukacitaan karena anggota jemaat dapat mengalami suatu pesta gerejawi yang besar dilingkungan mereka terutama bagi jemaat-jemaat GMIM di pedesaan, hal ini di pandang sebagai peristiwa langka.⁶⁵

KESIMPULAN

Bertitik tolak pada uraian di depan khususnya dalam bagian rumusan masalah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. GMIM telah berperan cukup baik dalam gerakan ekumene. Peranan itu telah dimulai sejak masa embrio GMIM yaitu sejak zaman zending. Peranan para zending telah melahirkan tokoh-tokoh GMIM yang berperan penting dalam gerakan ekumene di Indonesia. Diantara banyak tokoh GMIM yang berperan dalam gerakan ekumene beberapa dapat disebutkan, zendeling H.C. Kruyt, G.P.H. Locher, Para pendeta Minahasa diantaranya Ds. A. Z. R. Wenas, Ds. R. M. Luntungan, dan Ds. W. J. Rumambi.
2. Dalam rangka komitmen dalam gerakan ekumene GMIM memiliki program. Program-program itu didasarkan pada prinsip bahwa GMIM adalah bagian dari gereja-gereja di Indonesia sehingga GMIM tidak membuka gerejanya di daerah lain dalam wilayah Indonesia. Ada banyak program GMIM yang mendukung gerakan ekumene baik dalam bidang pengorganisasian, pendidikan, kesehatan, pendanaan. Program-program ini seraha dengan pokok-pokok dalam LDKG yang kemudian lahir pada sidang raya ke X di Ambon. Diantara banyak program dapat disebutkan program pengiriman Tenaga Utusan Gereja baik dalam lembaga maupun gereja. Program ini di maksudkan untuk membantu dan memperkuat lembaga atau gereja lain dalam pelayanannya. Melalui program TUG para utusan gereja di kirim ke beberapa lembaga ekumenis sinode AM SULUTENG, GPI, PGI dan Gereja-gereja di Indonesia barat dan Timur di diantaranya GBKP, ONKP, GMIT, GPM, GKI Papua, gereja-gereja di Kalimantan, GMIBM, GPIG, GKST, GPID, GPIL, Gereja Toraja, GKSS (Penulis). Program ini didukung oleh pendanaan yang disediakan dan difasilitasi oleh GMIM.
3. Dalam kiprah tokoh-tokoh ekumenis GMIM yang berperan pada lembaga dan gereja secara regional, nasional, dan internasional. Dari uraian jelas bahwa peranan itu telah dilakukan pada masa pra-pembentukan DGI sebagai wadah ekumenis nasional. Secara khusus peranan Ds. W. J. Rumambi dalam Majelis Usaha Bersama Gereja-gereja Kristen Indonesia Timur yang menjadi cikal bakal DGI dan sebagai perintis berdirinya DGI sangat penting. DGI berubah nama menjadi PGI adalah tiang penyangga dalam usaha gerakan ekumene di Indonesia dan internasional.

⁶⁴ Sumber Arsip: GMIM, Telegram yang dikirimkan oleh Ds. R.M. Luntungan yang dikutip dalam Sidang Sinode GMIM ke -56, 24-28 Maret 1979., hlm. 91.

⁶⁵ A.F. Parengkuan. 1994. *Op. Cit.*, hlm 104-105

DAFTAR PUSTAKA

- Abineno, J.L.Ch. 1984. *Oikumene Dan Gerakan Oikumene*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Abineno J.L. Ch. 1978. *Sejarah Apostolat di Indonesia II/1*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Abineno, J.L.Ch.. 1997. "Dari Dewan Gereja-Gereja Di Indonesia Ke Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia," Dalam, J.M. Pattiasina dan Wainata sairin. *Tegar Mekar Di Bumi Pancasila*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Aritonang, Jan Sihar dan Steenbrink Karel. 2008. *A History Christianity In Indonesia*. Leiden : Boston
- Assa, N. Rudy. *Sejarah Ringkas GMIM 1934-2000*. Kakas, SULUT:Christyoan Christian Publications.
- Badan Pekerja Sinode GMIM. 1999. *Tata Gereja GMIM tahun 1999*. Tomohon.
- Banawiratma, J.B, Singgih Gerrit, Jacobs Tom, Th. Sumartana. 1994. *Tempat Dan Arah Gerakan Oikumenis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Banawiratma, J.B. 1994. "Gerakan Oikumenis Mau Kemana," dalam, Banawiratma dkk. *Tempat dan Arah Gerakan Oikumenis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Berkhof, H dan Enklaar. H. 1994. *Sejarah Gereja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- BPS GMIM, 2004.*Menggali Harta Terpendam*. Tomohon: Panitia Perayaan HUT ke-70 GMIM bersinode
- Darmaputera, Eka. 1974. *Berbeda Tapi Bersatu*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- End, Th. van den. 1993. *Ragi Carita I*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- End, Th.van den. 1989. *Ragi Carita 2*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. Hartono Chris. 1984. *Gerakan Ekumenis di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Dan Inovasi "Duta Wacana".
- Granfland, N. 1987. *Minahasa Masa Lalu dan Masa Kini*. Jakarta: Lembaga Perpustakaan Dokumentasi dan Informasi.
- Holtrop, P. N. 1982. *Selaku perintis Jalan. Ujung Pandang*. Yogyakarta : Kanisius.
- Jonge, de Christian. 1994. *Kapita Selekt*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. Renwarin Paul Richard. 2000. *Matuari Wo Tonaas*. Jakarta: Cahaya Pineleng.
- Jonge, de Christian. 1996. *Menuju Keesaan Gereja* . Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Luntungan, R. M. 1969. "Ds. A. Z. R. Wenas dan Geredja2 Daerah," diterbitkan dalam bulletin DGW.SULUTTENG. Tomohon.
- Locher, G.P.H. 1995. *Tata Gereja Gereja Protestan Di Indonesia*. BPK: Gunung Mulia.

Malonda, J. F. 1952. *Membuka Tudung Dinamika Filsafat Purba Minahasa*. Manado: Yayasan Badan Budaya "Wongken Werun".

Ngelow, Zakarias Jusuf. *Jalan Keesaan DGI*. (Tesis)

Ngelow, Z. Y. 1996. "Sejarah Singkat Gerakan Keesaan Di Indonesia," dalam Hengky, C. Wijaya dkk (ed). *Jalan Menuju Keesaan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ngelow Z.J.. 1995. "Beberapa catatan mengenai Pietisme," dalam Warta GKSS Calvin, Calvinisme, Pietisme, Gerakan Oikumene. (edisi April 1995).

Notulen GMIM tanggal 24-28 Maret 1979 di Tosuraya Ratahan. Arsip sinode GMIM.

Notulen persidangan sinode GMIM tanggal 4-9 Januari 1935. Arsip sinode GMIM.

Notulen persidangan sinode GMIM 1935. Arsip sinode GMIM.

Notulen persidangan sinode GMIM 23-26 November 1936. Arsip sinode GMIM.

Notulen persidangan sinode GMIM, 22-23 Agustus 1939. Arsip sinode GMIM,

Notulen Sidang Sinode GMIM 16-19 Juli 1946. Arsip Sinode GMIM.

Notulen sidang sinode GMIM. 16-18 Desember 1947. Arsip sinode GMIM.

Notulen Rapat Sidang Sinode GMIM 19-20 Mei 1948. Arsip Sinode GMIM.

Telegram yang dikirimkan oleh Pdt. R.M. Luntungan yang dikutip dalam notulen Sidang Sinode GMIM ke -56, 24-28 Maret 1979.

Panitia pelaksana, 2009. Sidang Am Gereja Sulawesi Utara Tengah Runia S. J. 1987. *Latar Belakang Dan Metode Pekabaran Injil Dari Johann Friderich Riedel Di Tondano*. Tomohon: Redaksi DGW SULLUTENG.

Pandeiro-Lengkong. B.B.B.1993. "Kehidupan GMIM Pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945," dalam, GPI sebagai buku peringatan HUT ke-75 Pdt. D.J. Lumenta. *Bersaksi dan Melayani untuk Mempersatukan*.

Parengkuan. A.F. 2008. "Riedel Dan Schwarz Bukan Penginjil Pertama Di Minahasa," dalam *Komentari*. (edisi 25-28 Juni)

Parengkuan. A. F. 2004. "Sejarah NZG dan Gereja Protestan di Minahasa," dalam Richard A.D Siwu. *Penugasan Agung*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Parengkuan. A. F. 2004. "GMIM Dan Pekabaran Injil," dalam Panitia Perayaan HUT GMIM Ke-70. *Menggal Harta Terpendam*. Tomohon-SULUT.

Parengkuan A.F.. 2005. "Gereja Masehi Injili Di Minahasa Gereja Bagian Mandiri Gereja Protestan Di Indonesia," dalam *Sejarah Gereja Protestan Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pekerja Harian Gereja Protestan Indonesia.

- Parengkuan A. F.. 2008. "Riedel Dan Schwarz Bukan Penginjil Pertama Di Minahasa," dalam Komentor 25-28 juni. (Manado).
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. "60 Tahun Bahtera Oikumen PGI di Tengah Samudra." dalam *Berita Oikumene*. 2010 (edisi khusus 60 tahun PGI-Mei) hal 6.
- Parengkuan, A. F. 1994. *The Presence, place and role of the Christian Evangelikal Church In Minahasa in the mids of the struggle of The Minahasan Society and Indonesian Nation in the Period Of 1934-1979*. Jakarta: Disertasi.
- Pattiasiana, J.M. dan Sairin Weinata. 1997.*Gerakan Oikumene Tegar Mekar di Bumi Pancasila*.Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Randwicjk, S. C. Graaf van. 1989. *Oegstgeest*, Jakarta :BPK Gunung Mulia.
- Sairin, Wainata. 1998. *Gereja, Agama-Agama Dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Sudiarja. A. 2006. *Agama (Di Zaman) Yang Berubah*. Yokyakarta: Kanisius
- Sumartana. 1994. "Gerakan oikumenis Dalam Perspektif Historis –Teologis," dalam Banawiratma dkk. *Tempat dan Arah Gerakan Oikumenis*. Jakarta: BPK Gunung mulia.
- Sutanto, Timotius Kurniawan.2008. *3 Dimensi Keesaan Dalam Jemaat*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Tulaar, David. 2004. "Misi arus Bawah," dalam Siwu. R.A.D. *Penugasan Agung*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Thomas, Norman. 2000. *Teks-teks Klasik Tentang Misi dan Kekristenan Dunia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Towards the "Eighth" Ecumenical Council*. Artikel. (<http://www.orthodoxinfo.com/ecumenism>) diunduh pada 25 Mei 2010.
- Siwu Richard, A. D.. 2004.*Penugasan Agung* . Jakarta: BPK Gunung mulia.
- Watusoke F.S. 2004. "Sejarah Gereja dan Kekristenan di Minahasa," dalam Richard Siwu. *Penugasan Agung*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Yewangoe.A.A. 2010. "Keberadaan PGI tidak bisa dilepaskan dari gereja-gereja," Oikumene,(edisi khusus 60 tahun PGI)
- Weichart Gabriel. 2004. Identitas Minahasa Sebuah Praktek Kuliner. *Antropologi Indonesia*. hlm 67-69. diunduh pada 4 April 2011.